

**DISERTASI**

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA  
PERIODE 2010-2021**

**DENI ANGGREANI SUTOMO**

**A013201004**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

# **DISERTASI**

## **ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE 2010-2021**

disusun dan diajukan oleh

**DENI ANGGREANI SUTOMO**

**A013201004**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

# LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

## ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE 2010-2021

disusun dan diajukan oleh

**DENI ANGGREANI SUTOMO**  
A013201004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,



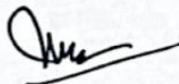
**Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E., MA**  
NIP 195903061985031002

Ko-Promotor,



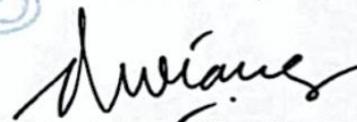
**Dr. Paulus Uppun, S.E., MA**  
NIP 195612311985031015

Ketua Program Studi,



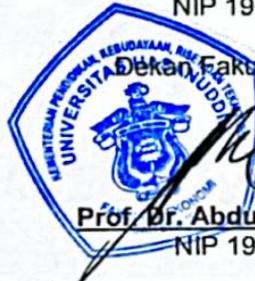
**Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si**  
NIP 19601231198811002

Ko-Promotor,



**Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si**  
NIP 197701192008012008

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



**Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si**  
NIP 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deni Anggreani Sutomo  
N I M : A013201004  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2010-2021 merupakan karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, terkecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Mei 2023



Yang membuat pernyataan,

*Deni*  
Deni Anggreani Sutomo

## PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini ialah tugas akhir dalam mencapai gelar Doktor (Dr) pada Program Pendidikan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Abd.Hamid Paddu, SE.,MA, CRP, Dr. Paulus Uppun, SE., MA dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,MSi.,CWM® sebagai penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan memberi motivasi, serta memberi bantuan literatur maupun diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Tidak lupa juga terima kasih kepada peneliti ucapkan kepada tim penguji baik penguji internal dan penguji eksternal.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ibu, Ibu, Ibu dan ayah, kakak, keluarga besar dan beberapa teman yang telah membantu peneliti berupa nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian disertasi ini. Semoga semua pihak mendapat balasan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga disertasi ini terselesaikan dengan baik.

Disertasi ini masih jauh dari sempurna meskipun telah menerima bantuan dari beberapa pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam disertasi ini merupakan tanggung jawab peneliti sepenuhnya dan bukan tanggung jawab dari para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan disertasi ini.

Makassar, 31 Mei 2023



Peneliti

## ABSTRAK

**DENI ANGGREANI SUTOMO**, Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2010-2021 (dibimbing oleh **Abd. Hamid Paddu, Paulus Uppun, Nur Dwiana Sari Saudi**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pengeluaran pemerintah, upah minimum, infrastruktur fisik dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif yang merupakan gabungan dari provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation model (SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah melalui penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Upah minimum secara langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, dan upah minimum melalui penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Infrastruktur fisik secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur fisik melalui penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan infrastruktur fisik melalui pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. PMDN per kapita secara langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan PMDN per kapita melalui penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan PMDN per kapita melalui pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

**Kata Kunci:** Pengeluaran pemerintah, upah minimum, infrastruktur fisik, penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan



## ABSTRACT

**DENI ANGGREANI SUTOMO**, Analysis of Income Inequality in Indonesia for the Period 2010-2021 (guided by **Abd. Hamid Paddu, Paulus Uppun, Nur Dwiana Sari Saudi**)

This study aims to determine the direct and indirect effects of government expenditures, minimum wage, physical infrastructure, and domestic investment (PMDN) per capita on income inequality through employment and economic growth.

This study used quantitative descriptive study. The type of data employed quantitative secondary data which was a combination of Indonesian provinces from 2010 to 2021. The analysis model used in this study involved the structural equation model (SEM).

The research results revealed that direct government expenditures has a does not have effect on income inequality, and government expenditures through indirect labor absorption also has a positive and significant effect on income inequality. Meanwhile, the government expenditures through indirect economic growth does not have effect on income inequality. Indirect minimum wage does not have effect on income inequality, while the minimum wage through labor absorption has a positive and significant effect on income inequality, and the minimum wage through economic growth has a positive and significant effect on income inequality. Direct physical infrastructure has a positive and significant effect on income inequality, and physical infrastructure through labor absorption has a positive effect on income inequality. Meanwhile, physical infrastructure through indirect economic growth does not have effect on income inequality. Indirect per capita domestic investment (PMDN) does not have effect on income inequality, while PMDN per capita through labor absorption has a positive and significant effect on income inequality. PMDN per capita through indirect economic growth does not have effect on income inequality.

**Keywords:** *Government expenditures, minimum wage, physical infrastructure, per capita domestic investment (PMDN), labor absorption, economic growth, income inequality*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian .....	21
1.4 Manfaat Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
2.1 Landasan Teori .....	23
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan .....	23
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	33
2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	35
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah.....	39
2.1.5 Upah Minimum .....	43
2.1.6 Infrastruktur Fisik.....	47
2.1.7 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Per Kapita .....	51
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	53
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	53
2.2.2 Hubungan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan	

Pendapatan .....	55
2.2.3 Hubungan Infrastruktur Fisik Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	59
2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Per kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	60
2.2.5 Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	63
2.2.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	66
2.2.7 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Infrastruktur Fisik, PMDN Per kapita Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	70
2.2.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Infrastruktur Fisik, PMDN Per Kapita Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	72
2.2.9 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Infrastruktur Fisik, PMDN Per kapita, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan .....	74
2.3. Studi Empiris .....	79
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>119</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	119
3.2 Hipotesis .....	125
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>127</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	127
4.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	127
4.3 Populasi Dan Sampel .....	128
4.4 Jenis Dan Sumber Data .....	128
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	128
4.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional .....	130

4.7	Teknik Dan Analisis Data .....	132
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>137</b>
5.1	Deskripsi Ketimpangan Pendapatan .....	137
5.2	Deskripsi Penyerapan Tenaga Kerja .....	138
5.3	Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi .....	139
5.4	Deskripsi Pengeluaran Pemerintah .....	141
5.5	Deskripsi Upah Minimum .....	142
5.6	Deskripsi Infrastruktur Fisik .....	144
5.7	Deskripsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	146
5.8	Deskripsi Hasil Penelitian .....	148
<b>BAB VI</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>160</b>
6.1	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Penyerapan Tenaga Kerja .....	160
6.2	Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Penyerapan Tenaga Kerja .....	162
6.3	Analisis Pengaruh Infrastruktur Fisik Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Penyerapan Tenaga Kerja .....	168
6.4	Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Penyerapan Tenaga Kerja .....	171
6.5	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	173
6.6	Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	175

6.7 Analisis Pengaruh Infrastruktur Fisik Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	178
6.8 Analisis Pengaruh PMDN Per kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi .....	183
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	186
7.1 Kesimpulan .....	186
7.2 Implikasi Teoritis Dan Empiris Hasil Penelitian .....	190
7.3 Keterbatasan Penelitian .....	191
7.4 Saran .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	193
<b>LAMPIRAN</b> .....	212

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, PTK	4
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, PTK	9
Gambar 1.3 Infrastruktur Fisik, PMDN, Pertumbuhan Ekonomi	16
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian	124
Gambar 5.1 Goodness of Fit Model	149
Gambar 5.2 Kerangka Model Hasil Estimasi Penelitian	156

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Empiris	79
Tabel 5.1 Goodness of fit model	150
Tabel 5.2 Normality Test	151
Tabel 5.3 Hasil Uji Pengaruh Langsung	152
Tabel 5.3 Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung	157

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia dan selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi paling mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian hampir di setiap negara. Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama. Permasalahan yang sering muncul dan yang sering terjadi di negara maju dan berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Ketimpangan antara kaya dan miskin berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade. Tren ketimpangan lebih beragam di negara berkembang dengan beberapa negara mengalami ketidaksetaraan, dapat dilihat dengan adanya ketidaksetaraan yang meluas dalam akses ke pendidikan dan keuangan. Pemicu tingkat ketidaksetaraan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya telah menjadi beberapa isu yang paling sering diperdebatkan oleh pembuat kebijakan dan peneliti. Isu ketimpangan di Indonesia telah menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ketimpangan tersebut muncul dari ketimpangan ekonomi pada pembagian distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya sebuah hipotesa yang dikenal yaitu Hipotesis U terbalik (*Inverted U curve*) oleh Simon (Kuznets, 1955; Herawati, 2006; Nuryanto, 2017). Menurut karya klasik Kuznets (1955), ketimpangan ekonomi merupakan hasil dari tahapan pembangunan. Adanya distribusi kekayaan yang relatif sama di

negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah. Tetapi seiring dengan berkembangnya suatu negara, semakin banyak modal yang diperoleh akan menyebabkan pemilik modal ini memiliki lebih banyak pendapatan yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan pendapatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya cukup tinggi. Sebagian besar permasalahan ketimpangan pendapatan di Indonesia disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai upaya telah dicoba guna mengurangi tingkat ketimpangan. Akan tetapi, ketimpangan tidak dapat dihilangkan melainkan hanya dapat dikurangi agar terjadi keselarasan dalam proses pertumbuhannya. Ketimpangan pasti akan selalu ada, baik dalam negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Perbedaannya terletak pada seberapa besar atau kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi dan tingkat kesulitan dalam mengatasinya.

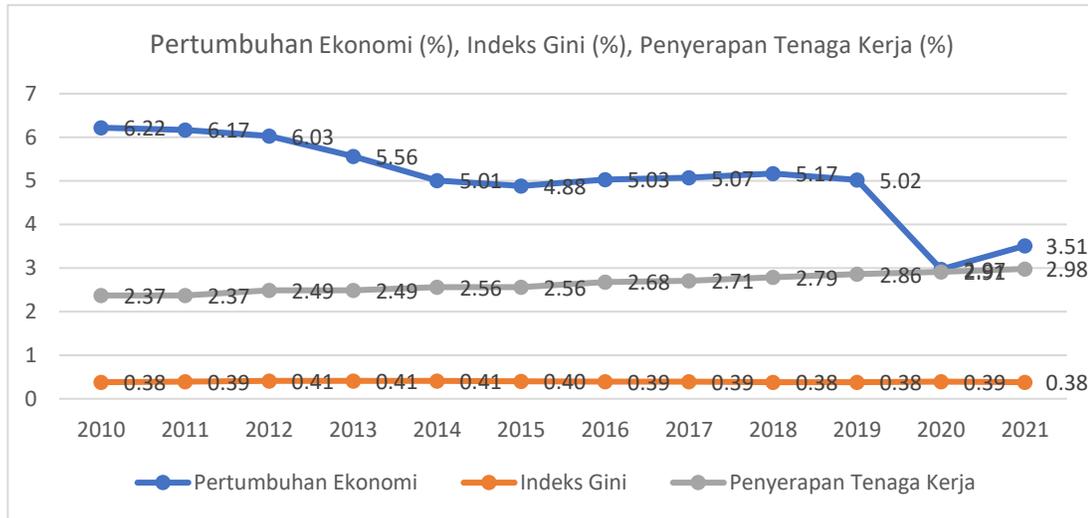
Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi persoalan ketimpangan yang terjadi pada individu atau rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama lebih dari dua dekade terakhir, pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki hubungan negatif ditandai dengan naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang pada saat bersamaan tingkat ketimpangan pendapatan berfluktuasi juga dan masih berada pada level yang tinggi.

Melihat hal ini, pertumbuhan belum tentu memberi jaminan bahwa ketimpangan pendapatan akan rendah. Banyak Negara yang berkembang yang mempunyai pertumbuhan ( $\pm > 7$  persen tahun), namun tingkat ketimpangan pendapatan juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketimpangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara terkadang menjadi sebuah dilema

antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketimpangan pendapatan (Deinger dan Olinto, 2000).

Selanjutnya, Indeks Atkinson adalah ukuran kesenjangan pendapatan yang dikembangkan oleh ekonom Inggris, Anthony Barnes Atkinson. Ukuran ini mampu menangkap perubahan atau pergerakan pada segmen-segmen yang berbeda dari distribusi pendapatan. Indeks ini bisa diubah menjadi pengukuran normatif dengan mengesankan koefisien  $\epsilon$  sebagai penimbang pendapatan. Indeks Atkinson menjadi lebih sensitif untuk berubah ketika mencapai nilai mendekati satu. Sebaliknya, ketika mendekati nol, indeks Atkinson menunjukkan bahwa akan lebih sensitive ke perubahan batas atas distribusi pendapatan. Perhitungan indeks Atkinson dimulai dengan konsep EDE (*Equally Distributed Equivalent*). EDE adalah level pendapatan dimana jika pendapatan tersebut dihasilkan oleh setiap individu dalam distribusi pendapatan, maka semua individu tersebut dimungkinkan untuk mencapai level kesejahteraan yang sama (Atkinson, 2015).

Ditinjau lebih seksama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum bisa mencapai kestabilan ekonomi. Salah satunya terlihat dari distribusi pendapatan masyarakatnya yang tidak merata, dimana Indonesia mempunyai prospek jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerjanya, namun disisi lain distribusi pendapatan di Indonesia masih timpang dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Sehingga dilihat dari Gini Ratio berada pada ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan, ditambah lagi dengan adanya resesi akibat Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang dilihat dari indeks gini.



**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan**  
**Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode 2010-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Data pada tahun terakhir terjadi penurunan gini ratio dan berada pada titik yang sama dimana, penurunan gini ratio bukan karena Pemerintah berhasil mengurangi ketimpangan, melainkan berdasarkan data BPS gini ratio menurun tipis karena pengeluaran 20 persen masyarakat menengah ke atas menurun karena perlambatan perekonomian global. Selain itu, pengeluaran 40% kelompok masyarakat yang menengah membaik karena aktivitas ekonomi kreatif serta usaha kecil dan menengah (UKM) membaik.

Idealnya, gini ratio menurun karena adanya percepatan pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah lebih cepat dari tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya masih terbilang lumayan tinggi. Indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat” dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”, sedangkan di Indonesia bergerak pada di nilai 0,3 hingga 0,4 (moderat).

Deskripsi keadaan di Indonesia ini, ada beberapa yang perlu disoroti yaitu pertama, angka ketimpangan masih berada di level yang lumayan tinggi dari tahun ke tahun dengan angka rata-rata 0,39 persen padahal dari penyerapan tenaga kerja meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Kedua, pertumbuhan ekonomi terlihat berfluktuasi setiap tahunnya, dimana jika melihat teori (kuznet, 1955) seharusnya saat pembangunan, ketimpangan akan meningkat dan setelah pembangunan ketimpangan akan menurun. Namun tidak semua ahli ekonomi pembangunan setuju dengan prediksi kuznet, beberapa bukti ditunjukkan (Rani, 2014; Herawati, 2016) tampaknya membenarkan pendapat mereka, sesuai dengan penelitiannya di Taiwan bahwa disana tidak terdapat konflik, sekalipun dalam jangka pendek antara pertumbuhan dan pemerataan. Kasus di Taiwan juga membuktikan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat direalisasikan secara simultan melalui model pembangunan dualis (Lai, 1989).

Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan di atas, bahwa ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang atau jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat.

Melihat hal ini pengalaman di beberapa negara cenderung meragukan validitas hipotesis U, bukti empiris menunjukkan bahwa terdapat beberapa negara yang berhasil memadukan pertumbuhan dan pemerataan, seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Pakistan dan Korea Selatan. Adapun negara yang berhasil menciptakan pertumbuhan tinggi tetapi disertai dengan ketimpangan yang semakin melebar seperti Bostwana, Kamerun, Kenya, Philipina, Brasilia dan Indonesia. Juga tidak sedikit negara yang pertumbuhan ekonominya rendah tetapi dengan ketimpangan yang terus melebar seperti Equador, Panama, Srilanka dan India. Hasil ini juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara pertumbuhan dengan perubahan proporsi

pendapatan yang diterima 20 persen penduduk miskin, atau dengan perubahan proporsi penduduk pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Dalam teori Atkinson (2015) menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat dengan melihat output pemerintah dalam kebijakan analisis ekonomi. Langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yaitu investasi publik hingga kebijakan untuk inovasi. Teori lain dari ketimpangan pendapatan, memperluas gagasan para ahli ekonomi bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya konsumsi tambahan tetapi juga pengembangan potensi manusia. Sen mengatakan pentingnya pengembangan potensi manusia, bagi Sen ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk mereka, ketimbang berusaha memproduksi lebih banyak barang atau memahami bagaimana cara untuk memaksimalkan kepuasan. Amartya Sen menganggap bahwa perdagangan bebas dapat memaksimalkan kesejahteraan individu yang rasional (Amartya Sen, 1973).

Amartya Sen menolak asumsi rasionalitas manusia dan juga menolak *pareto optimal* (sebuah kondisi dimana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi (*better off*) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain (*worse off*) sebagai kriteria bagi kesejahteraan ekonomi. Inti asumsi rasionalitas adalah keyakinan bahwa individu adalah orang yang memaksimalkan kepuasan secara rasional.

Kebanyakan ahli ekonomi yakin bahwa individu bertindak menurut cara yang sangat rasional dan logis. Mereka melihat orang-orang mencoba mengetahui konsekuensi dari tindakan yang berbeda-beda dan memikirkan kepuasan yang mereka terima dari hasil setiap tindakan. Mereka percaya bahwa orang-orang bertindak untuk mendapatkan kepuasan maksimal (yang diharapkan) dan membiarkan orang bertindak dengan cara seperti ini akan membawa pada situasi *pareto optimal*.

Selanjutnya, menggunakan *pareto optimal* sebagai kriteria kesejahteraan mengandung beberapa persoalan. Sen mengemukakan bahwa hasil tindakan ekonomi bisa saja berupa *pareto optimal* tetapi justru menimbulkan bencana. Misalnya, dalam kasus dimana hanya ada segelintir orang kaya dan banyak orang lain yang kelaparan. Kondisi ini bisa saja merupakan kondisi *pareto optimal*, karena situasi tidak dapat diperbaiki tanpa mengambil pendapatan dari orang yang sangat kaya dan mengurangi kepuasan mereka. Namun, banyaknya orang yang kelaparan jelas bukan hal yang diinginkan (Sen, 1987).

Maksimalisasi kepuasan justru bertentangan dengan liberalisme, atau keyakinan bahwa orang seharusnya dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan selama tidak menghalangi apa yang ingin dilakukan orang lain (Sen, 1970). Karena analisis *utilitarian* tentang kesejahteraan individu tidak memadai, maka diperlukan perspektif yang lain, Sen mengusulkan pendekatan yang berpusat pada kemampuan (McPherson, 1992). Menurut perspektif ini, kesejahteraan manusia tergantung pada hal-hal yang dapat orang-orang lakukan dengan baik. Kesejahteraan manusia akan maksimum ketika mereka dapat membaca, makan dan dapat memberikan hak suaranya.

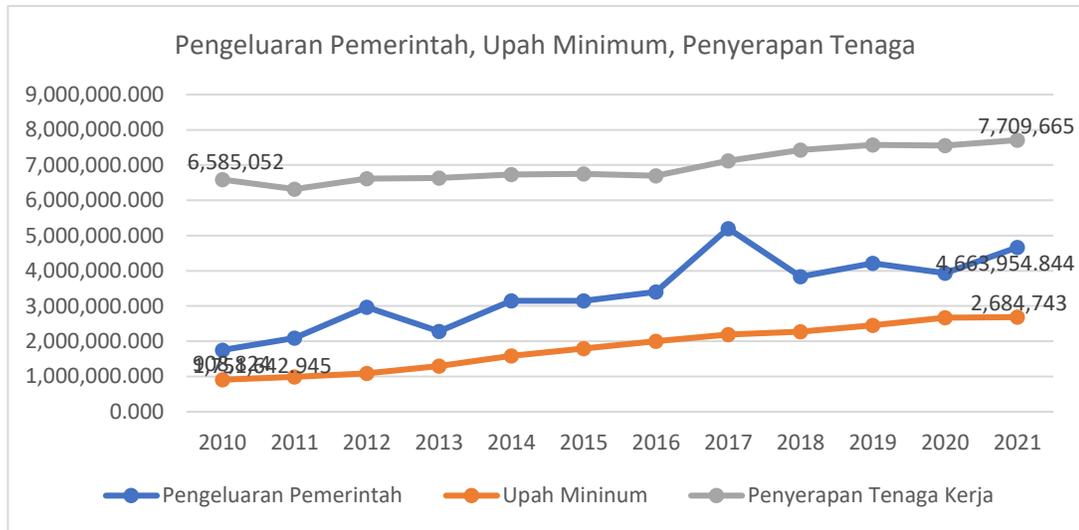
Bagian penting dari kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki orang dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut. Hal ini berarti bahwa ketika konsumen membeli barang tapi tidak punya pilihan, kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan dengan memberi lebih banyak pilihan, bahkan jika konsumen pada akhirnya tidak mendapatkan

lebih banyak barang. Sen bahkan melangkah lebih jauh dengan mengemukakan bahwa ekonomi tradisional mempunyai hubungan antara preferensi dan tindakan ke belakang – preferensi tidak menentukan tindakan manusia.

Dalam kondisi pasar modal yang tidak sempurna (*capital market imperfection*) hubungan antara *human capital* dengan ketimpangan pendapatan maupun aset mempunyai *trade off* pada kemampuan investasi individu pada pembentukan sumber daya manusia (*human capital*). Pada penduduk miskin yang tak punya akses pada *capital market*, maka akan kesulitan untuk mendapatkan dana guna membiayai investasi pada *human capital* maupun untuk kegiatan produksi (Bardhan dan Udhy, 1999).

Selain itu, alasan utama yang mendorong ketimpangan pendapatan adalah meningkatnya ketimpangan upah dan gaji, terutama antara tenaga kerja berketerampilan tinggi dan rendah, serta antara negara maju dan berkembang (Piketty, 2014). Ketimpangan pendapatan terutama muncul karena semakin tingginya otomatisasi kegiatan bisnis saat ini, yang menuntut dari calon dan karyawan untuk memiliki keterampilan yang berlebihan, untuk dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi (Navarro, 2007).

Distribusi pendapatan merupakan kunci dari ekonomi yang dilihat sebagai inti dari ketimpangan ekonomi. Jelas bahwa ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya ekonomi merupakan peluang dan bagaimana hal ini mempengaruhi hasil ekonomi bagi individu dan keluarga sangat penting. Gagasan Sen tentang kemampuan, misalnya, menyoroti peran sumber daya seperti pendidikan berfungsi dan berkembang dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Ketidaksetaraan ini terkait erat dengan struktur kelembagaan, termasuk pasar dan hak milik pribadi dan sosial, dan keduanya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh agregat performa ekonomi.



**Gambar 1.2 Perbandingan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia**

Sumber BPS 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, meskipun pengeluaran pemerintah meningkat setiap tahunnya namun tidak dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena banyaknya jumlah tenaga kerja dan rendahnya tingkat pendidikan para tenaga kerja di Indonesia mengakibatkan produktivitas tenaga pekerja rendah dengan keterampilan minim. Hal ini karena latar belakang penduduk bekerja di Indonesia rata-rata penduduk bekerja paling banyak bekerja dari tahun 2010 hingga tahun 2021 yaitu didominasi oleh lulusan SD sebesar 41 persen, kemudian diikuti oleh lulusan SLTP dengan nilai sebesar 28 persen, selanjutnya diikuti oleh tamatan SLTA umum/SMU sebesar 25 persen, belum tamat SD sebesar 21 persen, SLTA kejurusan / SMK sebesar 16 persen, Universitas sebesar 12 persen dan yang terendah Diploma sebesar 4 persen.

Banyaknya tenaga kerja yang didominasi lulusan SD merupakan salah satu alasan perlunya memperbaiki kualitas penyerapan tenaga kerja di

Indonesia. Idealnya bagaimana performa dari penduduk bekerja memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja yang secara otomatis berdampak pada upah minimum dilihat dari meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka.

Selanjutnya ketimpangan ekonomi dibagi menjadi tiga dimensi yaitu pertama ketimpangan pendapatan (*income inequality*) yang dilihat dari perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB), kedua ketimpangan kekayaan (*wealth inequality*), dari lembaga penjamin simpanan (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 56 persen dana yang disimpan di perbankan Indonesia dikuasai oleh 277.010 akun rekening, padahal total jumlah akun rekening di Indonesia mencapai lebih dari 295 juta. dan ketiga adalah ketimpangan antar generasi (*Intergenerational inequality*) (Piketty, 2014).

Upaya untuk memodelkan hubungan antara infrastruktur dan ketimpangan didasarkan pada literatur tentang dinamika distribusi kekayaan di hadapan ketidaksempurnaan pasar modal (Banerjee dan Newman, 1993; Galor dan Zeira, 1993; Piketty, 1997). Dalam model ini, redistribusi kekayaan kepada orang miskin atau kelas menengah dapat meningkatkan efisiensi produktif (Aghion dan Bolton 1997).

Infrastruktur fisik mengacu pada beberapa macam infrastruktur seperti listrik secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Torrizi, 2009). Secara umum infrastruktur fisik ditemukan dapat secara tidak langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui akumulasi modal fisik dan pertumbuhan ekonomi (Calderon dkk,2014, Calderon dan Serven, 2004).

Peningkatan ketersediaan layanan produktif seperti infrastruktur untuk masyarakat umum tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan. Dalam konteks ini, perluasan layanan infrastruktur publik mengurangi ketimpangan di antara para pengusaha,

meningkatkan pengembalian investasi, dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan di antara segmen masyarakat yang kurang beruntung.

Peningkatan penyediaan layanan publik yang produktif tidak hanya meningkatkan pertumbuhan agregat, tetapi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, dan dengan demikian memberikan dampak tidak langsung lebih lanjut pada pertumbuhan apabila jasa tersebut bertambah secara heterogen di seluruh rumah tangga individu, khususnya penyediaan infrastruktur publik yang lebih besar menguntungkan kaum miskin secara lebih proporsional.

Penanggulangan ketimpangan pendapatan merupakan langkah awal yang penting karena dalam jangka panjang dapat mengatasi ketimpangan kekayaan dan antar generasi. Distribusi pendapatan yang lebih merata meningkatkan kemampuan dari kelompok-kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah untuk meningkatkan kekayaan (*ability to access more wealth*). Kondisi ini jika dapat dijaga secara berkesinambungan dapat mengikis ketimpangan antar generasi dengan dorongan dari lebih banyak mobilitas ekonomi vertikal (*vertical/upward mobility*). Logika berpikir ini yang akan menjadi kerangka berpikir utama dari analisis ini. Analisis akan fokus pada bagaimana mengatasi ketimpangan pendapatan pada UMKM dan UB yang erat kaitannya dengan penggunaan infrastruktur fisik yaitu konsumsi listrik sehari-sehari dalam menjalankan pekerjaan atau usaha (Piketty, 2014).

Secara konseptual, ada alasan bagus mengapa infrastruktur memiliki dampak yang berbeda terhadap pendapatan masyarakat miskin, selain dampaknya terhadap pendapatan agregat. Infrastruktur memfasilitasi akses kaum miskin ke peluang produktif, meningkatkan nilai aset mereka. Ini juga dapat meningkatkan hasil pendidikan mereka, sehingga meningkatkan sumber daya manusia mereka. Redistribusi kekayaan kepada orang miskin atau kelas menengah dapat meningkatkan efisiensi produktif (Aghion dan Bolton 1992, 1997). Peningkatan ketersediaan layanan produktif seperti infrastruktur untuk

masyarakat umum tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan.

Dalam konteks ini, perluasan layanan infrastruktur publik mengurangi ketimpangan kesempatan di antara para pengusaha, meningkatkan pengembalian investasi, dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan di antara segmen masyarakat yang kurang beruntung. Beberapa penelitian jenis ini menemukan bahwa infrastruktur fisik listrik meningkatkan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan ekonomi pedesaan non-pertanian, dan mengurangi timbulnya kemiskinan di beberapa wilayah geografis (Ravallion 2003; Zhu dan Luo 2006; Reardon et al. 2007). Perluasan fasilitas infrastruktur regional (misalnya listrik dan jalan raya) di beberapa wilayah dan distrik tertentu di India ditemukan telah meningkatkan standar hidup rata-rata dan menurunkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan ketika investasi infrastruktur disertai dengan divestasi di bidang pendidikan dan kesehatan (Majumder 2012).

Literatur terbaru mengkaji dampak program elektrifikasi di daerah pedesaan di negara berkembang. Dinkelman (2011) mengevaluasi dampak peluncuran besar-besaran jaringan listrik di pedesaan Afrika Selatan terhadap pekerjaan, terutama pekerja perempuan. Peluncuran ini, dimulai pada tahun 1995, menargetkan penggunaan rumah tangga berkapasitas rendah di daerah pedesaan daripada pengguna industri. Temuan utama adalah bahwa elektrifikasi mengarah pada peningkatan lapangan kerja perempuan baik pada margin ekstensif maupun intensif. Misalnya, perempuan bekerja hampir 9 jam lebih banyak per minggu di kabupaten yang rata-rata mengalami peningkatan elektrifikasi. Hal ini terjadi karena rumah tangga yang memiliki akses listrik mengganti pembakaran kayu di rumah dengan listrik untuk memasak dan penerangan, yang membebaskan waktu perempuan dari rumah ke pekerjaan pasar. Ini juga memberikan peluang baru untuk memproduksi barang dan jasa rumahan untuk pasar, baik melalui wirausaha atau usaha mikro.

Secara teoritis dan empiris, infrastruktur diyakini mampu mempersempit ketimpangan pendapatan (Calderon dan Servén, 2004; Chong dan Calderon, 2004; Kannan et al., 2018). Namun demikian, beberapa studi empiris menemukan bahwa infrastruktur dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena distribusi pengembalian yang tidak merata (Bajar dan Rajeev, 2016; Majumder, 2012).

Sejumlah penelitian menemukan hasil yang bertentangan mengenai hubungan ketimpangan pendapatan infrastruktur. Calderon dan Servén (2004) menyimpulkan bahwa infrastruktur fisik dalam jangka panjang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan terbalik yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, infrastruktur fisik ternyata berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di India (Bajar dan Rajeev, 2016; Majumder, 2012 dan Makmuri, 2017).

Ketimpangan pendapatan infrastruktur fisik yang positif kemungkinan disebabkan oleh ketidaksetaraan pengembalian infrastruktur fisik antara si kaya dan si miskin (Bajar dan Rajeev, 2016; Makmuri, 2017). Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik dikatakan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena mendorong “perubahan teknologi, globalisasi, dan reformasi berorientasi pasar” yang mungkin menguntungkan pekerja berketerampilan tinggi (Zhuang dkk., 2014).

Sesuai dengan hasil empiris tersebut, bahwa infrastruktur fisik seperti transportasi, telekomunikasi, dan listrik berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia (Makmuri, 2017). Perbedaan dampak infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di setiap negara dapat dijelaskan oleh pengaruh tingkat awal ketimpangan pendapatan, tahap pembangunan, dan tingkat pembangunan infrastruktur (Tian dan Li, 2019).

Pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan (Makmuri, 2017). Adanya kecenderungan infrastruktur fisik, terutama transportasi, telekomunikasi dan ketimpangan

pendapatan dapat disebabkan oleh pengembalian yang tidak merata yang diterima oleh kelompok pendapatan yang berbeda. Perbedaan pengembalian yang diterima oleh orang miskin dan orang kaya dapat menjelaskan hubungan ketimpangan pendapatan infrastruktur fisik yang positif di Indonesia (Makmuri, 2017).

Penanaman modal dalam negeri, sesuai pasal 3 ayat (2) UUPM disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal salah satunya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Dampak ganda PMDN selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berpengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi lainnya. Inilah keterkaitan PMDN dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan investasi ini dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional yang menurun di bawah kapasitas pendapatan nasional. Peningkatan investasi kemudian masuk ke dalam daerah yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya kecenderungan dari lebih tingginya tingkat pengembalian modal (*return on capital*) dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi ini menyebabkan keluarga yang memiliki kekayaan melimpah mengalami peningkatan kekayaan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan semakin buruknya ketimpangan. Generasi berikutnya dari keluarga ini kemudian dapat menikmati warisan kekayaan dengan nilai yang semakin meningkat. Hal yang disebut Piketty sebagai *kapitalisme patrimonial*, sementara keluarga dengan kekayaan terbatas semakin tertinggal (Piketty, 2014).

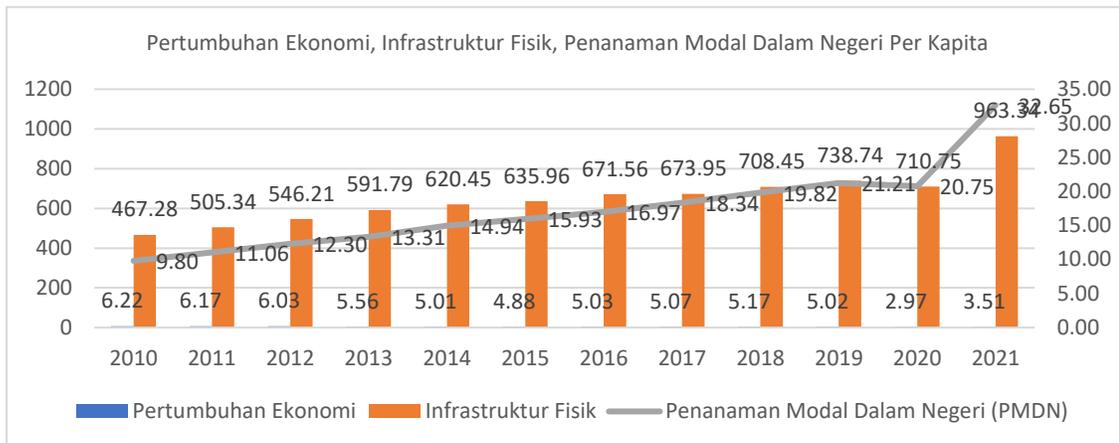
Kepemilikan dana di perbankan yang lebih dari separuhnya hanya terkonsentrasi di 200-an ribu rekening menunjukkan realita ketimpangan

kekayaan. Lebih dari 50 persen dana yang tersimpan di perbankan pada 2019 dimiliki oleh tidak sampai 1 persen dari total lebih dari 200 juta penduduk Indonesia. Fakta yang mengejutkan adanya gambaran pahit dari realita ketimpangan di Indonesia. Hanya dalam waktu satu hari orang Indonesia terkaya dapat memperoleh bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran kelompok masyarakat paling miskin untuk kebutuhan dasar selama setahun. Bunga dari kekayaan atau yang biasa disebut *return on capital* dalam jangka panjang dapat memperparah ketimpangan antra generasi. Keturunan dari pemilik modal dapat meningkatkan kekayaan yang dimiliki secara pasif dengan pendapatan dari bunga atas kapital yang disimpan di perbankan. Sementara, keturunan dari keluarga yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih rendah harus berjuang lebih keras untuk mencapai *mobilitas vertical* (Oxfam, 2017).

Pandangan mengenai ketimpangan merupakan *necessary condition* dan insentif yang baik untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi pengusaha dan perorangan akan menaikan tabungan, tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Kusumo, 1994). Argumen ini menyebabkan meluasnya pertumpukan kekayaan para elite penguasa. Menurut Gunar Myrdal proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di tiap negara menghasilkan hubungan sirkuler yang menyebabkan kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, *backwash effect* (dampak baik) cenderung lebih besar daripada *spread effect* (Jhingan, 2004).

Ada beberapa pandangan diberikan Todaro : “*why greater equality in developing countries may in fact be condition for self-sustaining economi growth*” (Todaro, 2000). Pendapat ini berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut : 1) pemerataan pendapatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit, pembiayaan sekolah, 2) berdasarkan data di negara sedang berkembang kemampuan menabung dan berinvestasi ke dalam negeri orang-

orang kaya rendah, 3) pemerataan akan meningkatkan taraf hidup serta produktivitas kerja, 4) pemerataan akan meningkatkan daya beli masyarakat, 5) pemerataan akan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan hubungan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan investasi. Berikut hubungan dari Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.



**Gambar 1.3 Perbandingan Infrastruktur Fisik (listrik), PMDN Per kapita, dan Pertumbuhan Ekonomi (dalam Satuan Persen)**

Sumber BPS, BKPM (diolah)

Berdasarkan grafik terlihat bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan infrastruktur fisik rata-rata terjadi peningkatan setiap tahunnya, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir menurun setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017, 2018 dan 2021 terjadi peningkatan. Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan, sehingga sering disebut *engine of growth*. Model-model pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik mengandalkan investasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan investasi yang tinggi akumulasi kapital dapat dicapai. Faktanya yang terjadi di Indonesia, meskipun investasi dalam negeri

meningkat, pertumbuhan ekonomi rata-rata mengalami penurunan terkecuali yang sudah dijelaskan di atas.

Investasi bersifat penanaman modal langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja pada akhirnya dapat meningkatkan output nasional. Dan untuk infrastruktur dan ketimpangan pendapatan adalah identifikasi endogenitas yaitu ketimpangan infrastruktur dan pendapatan memiliki kausalitas dua arah. Infrastruktur dipandang sebagai strategi lain yang sangat penting untuk mendistribusikan pendapatan ke seluruh anggota masyarakat (Chatterjee dan Turnovsky, 2012). Ketimpangan pendapatan dapat mencegah masyarakat miskin mengakses layanan infrastruktur, sementara pada saat yang sama infrastruktur yang tidak memadai dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Sebagai contoh, masyarakat miskin apabila tidak memiliki uang maka jelas tidak dapat memperoleh akses atau menggunakan infrastruktur, sedangkan yang menyebabkan ketimpangan meningkat sebagai contoh tidak adanya listrik dapat menghambat kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan jual yang secara tidak langsung memperburuk ketimpangan.

Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan yang lebih penting yaitu mengidentifikasi jalur yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan yang ada, keadaan situasi yang berbeda. Akibat perubahan berbagai faktor (penduduk bekerja, upah minimum, infrastruktur fisik, PMDN per kapita, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi) yang dijelaskan di atas, menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Atas fenomena ini, ketimpangan pendapatan merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi mengenai ketimpangan pendapatan tidak hanya pada ranah ekonomi, tetapi

mempunyai keterkaitan erat dalam menjalankan aktivitas perekonomian di negara berkembang maupun di negara maju, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk aktivitas produksi berbagai sektor perekonomian.

Selain itu, studi ketimpangan pendapatan seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama di antara para peneliti, dimana adanya silang pendapat dari masing-masing pihak mempunyai argumentasi yang logis dan telah membuktikannya secara empiris. Dalam kesepakatan pendapatan yang signifikan dan ketidaksetaraan ada di antara dan di dalam negara (Milanovic, 2006; Held dan Kaya, 2007; World Bank, 2007). Perdebatan utamanya ialah apakah ketimpangan meningkat atau menurun dalam lima puluh tahun terakhir (Arestis, Chortareas dan Magkonis, 2010). Misalnya, (Martin, 2002) dan (Dollar, 2007) memberikan bukti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menurun, sedangkan kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin sebenarnya meningkat (Milanovic, 2005; Wiguna dan Panennungi, 2019).

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryono, 2000). Adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Peningkatan ketimpangan di Indonesia baru-baru ini dinyatakan tingkat disparitas pendapatan antar provinsi masih parah (Resosudarmo dan Vidyattama, 2006) dan ada beberapa bukti disparitas regional yang semakin meningkat (Sakamoto, 2013). Mempertimbangkan konsekuensi ketimpangan baik di tingkat nasional maupun sub-nasional, menjadi penting untuk memahami kekuatan pendorong di balik ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Literatur menunjukkan berbagai strategi pengurangan ketimpangan

pendapatan dapat dicapai. Selain itu, beberapa penelitian memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Istiqamah, etc, 2018). Penelitian lainnya, Cialani menyimpulkan bahwa ketimpangan pada kelas atas distribusi kekayaan berhubungan positif dengan pertumbuhan pendapatan, sedangkan distribusi kekayaan pada kalangan bawah berhubungan negatif dengan pertumbuhan pendapatan (Cialani, 2013; Voitchovsky, 2005; Barro, 2000).

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa yang perlu disoroti bahwa pertama, angka ketimpangan masih berada di level yang lumayan tinggi dari tahun ke tahun padahal dari penyerapan tenaga kerja terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, pertumbuhan belum tentu memberi jaminan bahwa ketimpangan pendapatan akan rendah. Banyak Negara yang berkembang yang mempunyai pertumbuhan yang tinggi, namun tingkat ketimpangan pendapatan juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketimpangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara terkadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketiga, penyerapan tenaga kerja rata-rata memiliki keterampilan yang kurang secara otomatis berdampak pada upah minimum yang akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan. Keempat, infrastruktur fisik secara tidak langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui akumulasi modal fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, PMDN tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Melihat fenomena ini maka peneliti melakukan penelitian terhadap masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang ketimpangan di Indonesia dengan judul “Analisis Pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2021”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Apakah infrastruktur fisik berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Apakah penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
5. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
6. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
7. Apakah infrastruktur fisik berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
8. Apakah penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

### 1.3 Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastruktur fisik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia
4. Untuk mengetahui dan menganalisis penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastruktur fisik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang memberikan manfaat keterkaitan secara langsung dengan penelitian yang relevan yaitu:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, upah minimum, infrastruktur fisik, penanaman modal dalam negeri (PMDN) per kapita, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dengan tujuan mengentaskan ketimpangan pendapatan di masa depan.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah strategi dalam penurunan angka ketimpangan pendapatan dan menyempurnakan kebijakan yang telah berjalan.
3. Untuk bahan referensi bagi peneliti dalam mengembangkan kerangka konseptual, khususnya pada penelitian ketimpangan pendapatan. Dimana yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sekarang menggunakan variabel intervening dengan menggabungkan dua model jalur yaitu jalur *aggregate supply* (penyerapan tenaga kerja) dan *aggregate demand* (pertumbuhan ekonomi).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan ialah sebuah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak adanya pemerataan. Ketimpangan ini ditentukan dari tingkat pembangunan, *heterogenitas etnis*, kediktatoran dan pemerintahan yang gagal dalam menghargai *property rights* (Glaesser, 2006).

Distribusi pendapatan dapat berupa pemerataan ataupun ketimpangan yang dideskripsikan tingkat pembagian penghasilan yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi (Ismoro, 1995; Rahayu, 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi saat setelah didapatkan pendapatan dari kegiatan usaha. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan maupun meratanya suatu hasil pembangunan dari suatu daerah maupun negara, baik itu yang diterima dari masing-masing orang atau dari kepunyaan faktor-faktor produksi pada kalangan penduduknya.

Distribusi pendapatan didasarkan untuk kepemilikan faktor produksi yang berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat didasarkan dari kepemilikan faktor produksi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, pendapatan dari hasil yang berupa upah maupun gaji dan besarnya bergantung dari tingkat produktifitasnya. Kedua, pendapatan dari sumber lain misalnya sewa, laba, bunga maupun warisan. Namun relevansi teori fungsional tidak dapat mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan dari luar pasar (faktor-faktor non ekonomis) seperti kekuatan untuk menentukan faktor-faktor harga (Todaro dan Smith, 2003).

Kesenjangan ekonomi maupun ketimpangan pada distribusi pendapatan ialah realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dunia, baik itu negara maju maupun negara yang berkembang, dan sering menjadi isu penting untuk diperhatikan atau ditinjau. Di negara berkembang masalah ketimpangan sudah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan dari puluhan tahun lalu.

Ketidaksetaraan ekonomi dapat dipahami sebagai ketidaksetaraan dengan efek ekonomi yang merupakan hasil dari proses ekonomi yang mendasarinya. Ketidaksetaraan dikaitkan dengan perubahan dalam konteks tingkat dan tren ketidaksetaraan faktual sesuai dengan daerah masing-masing (Jenkins dan Micklewright, 2007).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan sering dikatakan dimulai dari awal munculnya sebuah hipotesa yang terkenal ialah Hipotesis U terbalik (*inverted U curve*) oleh Simon Kuznets tahun 1955. Simon Kuznets berpendapat bahwa awal mula saat pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan tidak merata, namun saat mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan merata.

Memperluas gagasan para ahli ekonomi tentang kesejahteraan manusia sehingga mencakup tidak hanya konsumsi tambahan tetapi juga pengembangan potensi manusia. Sen mengatakan pentingnya pengembangan potensi manusia. Bagi Sen, ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia, dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk mereka, ketimbang berusaha memproduksi lebih banyak barang atau memahami bagaimana cara untuk memaksimalkan kepuasan. Amartya Sen menganggap bahwa perdagangan bebas dapat memaksimalkan kesejahteraan individu yang rasional (Amartya Sen, 1973).

Amartya Sen menolak asumsi rasionalitas manusia dan juga menolak *pareto optimal* sebagai kriteria bagi kesejahteraan ekonomi. Inti asumsi

rasionalitas adalah keyakinan bahwa individu adalah orang yang memaksimalkan kepuasan secara rasional. Kebanyakan ahli ekonomi yakin bahwa individu bertindak menurut cara yang sangat rasional dan logis. Mereka melihat orang-orang mencoba mengetahui konsekuensi dari tindakan yang berbeda-beda dan memikirkan kepuasan yang mereka terima dari hasil setiap tindakan. Mereka percaya bahwa orang-orang bertindak untuk mendapatkan kepuasan maksimal (yang diharapkan) dan membiarkan orang bertindak dengan cara seperti ini akan membawa pada situasi *pareto optimal*.

*Pareto optimal* sebagai kriteria kesejahteraan mengandung beberapa persoalan. Dia mengemukakan bahwa hasil tindakan ekonomi bisa saja berupa *pareto optimal* tetapi justru menimbulkan bencana. Misalnya, dalam kasus dimana hanya ada segelintir orang kaya dan banyak orang lain yang kelaparan. Kondisi ini bisa saja merupakan kondisi *pareto optimal*, karena situasi tidak dapat diperbaiki tanpa mengambil pendapatan dari orang yang sangat kaya dan mengurangi kepuasan mereka. Namun, banyaknya orang yang kelaparan jelas bukan hal yang diinginkan (Sen, 1985).

Maksimalisasi kepuasan justru bertentangan dengan liberalisme, atau keyakinan bahwa orang seharusnya dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan selama tidak menghalangi apa yang ingin dilakukan orang lain (Sen, 1970), karena analisis utilitarian tentang kesejahteraan individu tidak memadai, maka diperlukan perspektif yang lain. Sen mengusulkan pendekatan yang berpusat pada kemampuan (McPherson, 1992). Menurut perspektif ini, kesejahteraan manusia tergantung pada hal-hal yang dapat orang-orang lakukan dengan baik. Kesejahteraan manusia akan maksimum ketika mereka dapat membaca, makan, dan dapat memberikan hak suaranya.

Bagian penting dari kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai orang dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut. Hal ini berarti bahwa ketika konsumen membeli barang tapi tidak punya pilihan, kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan dengan memberi

lebih banyak pilihan, bahkan jika konsumen pada akhirnya tidak mendapatkan lebih banyak barang. Sen bahkan melangkah lebih jauh dengan mengemukakan bahwa ekonomi tradisional mempunyai hubungan antara preferensi dan tindakan ke belakang – preferensi tidak menentukan tindakan manusia. Orang tidak menghargai buta huruf lalu kemudian memutuskan tidak belajar membaca. Justru orang yang tidak dapat membaca menyesuaikan preferensinya dan tidak menghargai kemampuan membaca. Menurut doktrin kepuasan standar, karena preferensi individu dihargai lebih dari apa pun juga, maka kesejahteraan menjadi maksimum jika orang buta huruf tidak didorong untuk belajar membaca. Tapi bagi Sen, tingginya tingkat bebas buta huruf akan meningkatkan kesejahteraan manusia karena memperbesar peluang orang dan meningkatkan kemampuannya.

Sen menerapkan pendekatan kemampuan pada bidang pengembangan ekonomi. Usaha ini dimulai dengan membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang, sedangkan perkembangan meliputi "pengembangan kemampuan manusia" (Sen, 1984). Pertumbuhan ekonomi menaikkan pendapatan per kapita. Perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Ini berarti membuat orang menjadi bagian dari komunitas dan memungkinkan mereka muncul di publik tanpa merasa malu karena mereka akan dianggap sebagai individu yang berguna.

Indeks Atkinson adalah ukuran kesenjangan pendapatan yang dikembangkan oleh ekonom Inggris, Anthony Barnes Atkinson. Ukuran ini mampu menangkap perubahan atau pergerakan pada segmen-segmen yang berbeda dari distribusi pendapatan. Indeks ini bisa diubah menjadi pengukuran normatif dengan mengesankan koefisien  $\epsilon$  sebagai penimbang pendapatan.

Indeks Atkinson menjadi lebih sensitive untuk berubah ketika mencapai nilai mendekati satu. Sebaliknya, ketika mendekati nol indeks Atkinson menunjukkan bahwa lebih sensitive ke perubahan batas atas distribusi pendapatan. Perhitungan indeks Atkinson dimulai dengan konsep EDE (*Equally Distributed Equivalent*). EDE adalah level pendapatan dimana jika pendapatan tersebut dihasilkan oleh setiap individu dalam distribusi pendapatan, maka semua individu tersebut dimungkinkan untuk mencapai level kesejahteraan yang sama (Atkinson, 2015).

Indeks Atkinson menggunakan parameter kesenjangan yang dilambangkan dengan  $\epsilon$ . Jika pendapatan masyarakat dianalogikan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota, berarti penggunaan  $\epsilon=0$  memiliki arti meningkatkan jumlah PDRB per kapita kabupaten/kota terkecil memiliki dampak kesejahteraan sosial yang sama sebagaimana meningkatkan jumlah PDRB per kapita kabupaten/kota terbesar. Untuk  $\epsilon>0$  berarti meningkatkan jumlah PDRB per kapita kabupaten/kota terbesar. Untuk sosial lebih baik dipilih daripada meningkatkan jumlah PDRB per kapita kabupaten/kota terbesar. Parameter kesenjangan  $\epsilon$  yang lebih besar menyebabkan peningkatan proporsi yang lebih besar bagi peningkatan proporsi yang lebih besar bagi peningkatan PDRB per kapita dari rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota. Indeks Atkinson dihitung dengan menggunakan parameter kesenjangan  $\epsilon$  yang bervariasi dari  $\epsilon=0,5$ ,  $\epsilon=1$ ,  $\epsilon=2$ , dan  $\epsilon=3$  dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kebijakan mana yang paling tepat untuk meminimalisir dampak kesenjangan regional terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran indeks Atkinson sensitive terhadap perubahan  $\epsilon$  sehingga menghasilkan indeks yang bervariasi untuk setiap  $\epsilon$  yang berbeda.

Ketimpangan ekonomi dibagi menjadi tiga dimensi yaitu pertama ketimpangan pendapatan (*income inequality*) yang dilihat dari perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB), kedua

ketimpangan kekayaan (*wealth inequality*), dari lembaga penjamin simpanan (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 56 persen dana yang disimpan di perbankan Indonesia dikuasai oleh 277.010 akun rekening, padahal total jumlah akun rekening di Indonesia mencapai lebih dari 295juta. dan ketiga adalah ketimpangan antar generasi (*Intergenerational inequality*) (Piketty, 2014).

Kecenderungan dari lebih tingginya tingkat pengembalian modal (*return on capital*) dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan keluarga yang memiliki kekayaan melimpah mengalami peningkatan kekayaan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menvebakkan semakin buruknya ketimpangan. Generasi berikutnya dari keluarga ini kemudian dapat menikmati warisan kekayaan dengan nilai yang semakin meningkat. Hal yang disebut Piketty sebagai *kapitalisme patrimonial*. Sementara, keluarga dengan kekayaan terbatas semakin tertinggal (Piketty, 2014).

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan secara literatur ekonomi terbagi menjadi dua kategori. Di satu sisi adanya langkah-langkah yang mencoba menangkap tingkat ketimpangan di beberapa secara objektif, biasanya dengan menggunakan beberapa ukuran statistik dari pendapatan dan disisi lain adanya indeks yang mencoba mengukur ketimpangan dalam beberapa hal normatif gagasan kesejahteraan sosial sehingga tingkat ketimpangan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih rendah untuk total pendapatan tertentu.

Ketimpangan pendapatan adalah variabel multi-fungsi, dan mengingat berbagai jenis ketimpangan pendapatan yang ada, tidak ada konsensus mengenai operasionalisasinya. Ada banyak cara dalam mengukur ketimpangan seperti kurva Lorenz, Koefisien gini, Kriteria Bank Dunia dan Indeks Williamson. Namun, Koefisien Gini adalah indeks yang paling banyak diterima dan digunakan untuk mewakili dan mengukur ketimpangan pendapatan. Ini mengambil namanya dari ahli statistik dan sosiolog Italia Gini

(1921) dan pertama kali diterbitkan dalam karyanya pada tahun 1921. Secara sederhana, koefisien Gini adalah rasio yang mengukur area antara garis kesejahteraan dan kurva Lorenz.

Nilai koefisien gini terletak antara nol dan satu. Pada nilai satu, pendapatan dianggap hanya diperoleh oleh satu orang, dengan demikian mewakili ketidaksetaraan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, ketika koefisien gini sama dengan nol, ini menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan secara merata di antara semua penerima pendapatan dalam populasi tertentu (Caminada dan Goudswaard, 2010). Koefisien Gini adalah rata-rata aritmatika dari nilai absolut dari perbedaan antara semua pasangan pendapatan. Misalnya, jika gini adalah 0,4, perbedaan yang diharapkan antara setiap pasangan pengamatan, yang dipilih secara acak dari distribusi, adalah 0,8 kali pendapatan rata-rata” (Figini, 1999).

Dari uraian di atas terlihat bahwa semakin kecil koefisien gini, semakin rendah ketimpangan pendapatan pada suatu populasi tertentu. Koefisien gini sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan, terutama jika dibandingkan dengan ukuran ketimpangan pendapatan lainnya. Dengan demikian, bahkan sedikit pergerakan pendapatan dari kelompok pendapatan yang lebih tinggi ke pendapatan yang lebih rendah kemungkinan akan menurunkan nilai koefisien gini (Figini, 1999). Namun pengukuran indeks gini di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang sudah terkonfirmasi langsung dari badan pusat statistik yaitu BPS tidak mempunyai sampel yang cukup pada pendapatan tertinggi di Indonesia dan pengukuran indeks gini hanya diukur dari sisi konsumsi bukan dari sisi pengeluaran, sehingga tidak dapat mendapatkan hasil yang akurat.

Dalam kesepakatan pendapatan yang signifikan dan ketidaksetaraan ada di antara dan di dalam negara (Milanovic, 2006; Held dan Kaya, 2007; World Bank, 2007). Perdebatan utamanya ialah apakah ketimpangan meningkat atau menurun dalam lima puluh tahun terakhir (Arestis, Chortareas dan Magkonis,

2010). Misalnya, (Martin, 2002) dan (Dollar, 2007) memberikan bukti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menurun, sedangkan (Milanovic, 2005) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin sebenarnya meningkat. Akar ketidaksepakatan ini juga berasal dari metode pengukuran ketidaksetaraan, seperti yang ditemukan (Milanovic, 2005) mengenai konsep yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam konteks ketidaksetaraan global. Salah satu metode yang mencakup perhitungan PDB perkapita.

Faktor spesifik negara lain yang menentukan ketimpangan pendapatan termasuk pajak penghasilan, akses ke pendidikan, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Galor dan Zeira, 1993). *Last but not least*, ada juga pendekatan neoklasik, yang menurutnya ketimpangan pendapatan ada, karena perbedaan nilai tambah yang diberikan oleh berbagai jenis dan kategori tenaga kerja (Salverda, Nolan dan Smeeding, 2009), juga menjelaskan mengapa ada ketimpangan pendapatan yang besar antara negara maju dan berkembang (Svizzero dan Tisdell, 2003).

Ketimpangan dalam studi empiris yaitu ketimpangan antar golongan masyarakat yang diukur Gini Rasio. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang gini rasionya meningkat (Kuncoro, 1997). Semakin timpang pola distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi diakibatkan meningkatnya agregat saving rate yang diiringi dengan meningkatnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan oleh orang-orang kaya yang mempunyai rasio tabungan yang tinggi daripada orang-orang miskin (Todaro, 1989). Apabila diasumsikan tujuan masyarakat hanya satu yaitu laju pertumbuhan PDRB, maka strategi terbaikpun ialah pola distribusi pendapatan yang mungkin setimpang. Sebaliknya jika keinginan masyarakat ialah pemerataan distribusi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat pula. Distribusi pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Pertama, distribusi pendapatan “fungsional” ataupun distribusi pendapatan menurut bagian dari faktor distribusi. mengenai keadaan distribusi pendapatan di berbagai negara yaitu digambarkan dua hal yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima dari berbagai golongan didasarkan pada besar pendapatan yang diterima (Ahluwalia, 1997; Hariadi, Bawono dan Arintoko, 2008). Menggolongkan penduduk penerima pendapatan : a. 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah, b. 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah dan c. 40 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi (Ahluwalia, 1976).

Kedua, Distribusi pendapatan mutlak yaitu presentase jumlah penduduk yang dimana pendapatannya mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari yang ada. Ukuran umum yang digunakan yaitu kriteria Bank Dunia dengan ketidakmerataan tertinggi apabila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Dan ketidakmerataan rendah apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah mendapatkan lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

Beberapa hal yang dapat dijadikan untuk indikator dalam mengukur pemerataan distribusi pendapatan, yaitu: pertama Kurva Lorenz, Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan dari penduduk. Kurva Lorenz ini terletak dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambungkan presentase kumulatif dari pendapatan nasional, sedangkan dari sisi datanya mewakili presentase kumulatif dari penduduk. Kurva ini ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar. Apabila kurva Lorenz semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan bahwa distribusi pendapatan nasional semakin merata. Namun sebaliknya, apabila kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka

mencerminkan keadaan semakin memburuk, dimana distribusi pendapatan nasional semakin timpang juga tidak merata.

Kedua, Indeks Gini atau Rasio Gini. Gini ratio ialah suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan cara membandingkan luas antara diagonal maupun kurva Lorenz yang dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Data yang diperlukan untuk perhitungan gini ratio yaitu Jumlah rumah tangga ataupun penduduk. Rata-rata pendapatan ataupun pengeluaran rumah tangga yang telah dikelompokkan menurut kelasnya. Ketiga, Kriteria Bank Dunia. Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia yang didasarkan dari porsi pendapatan nasional yang dinikmati dari tiga lapisan penduduk, yakni 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Keempat, Indeks Williamson. Indeks Williamson berbicara tentang angka indeks menunjukkan semakin ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Secara luas, Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Matolla dalam (Puspandika, 2007) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Dari angka tersebut, akan tercirikan seberapa berhasilnya pembangunan daerah di suatu wilayah, sehingga nantinya dievaluasi dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Berikut ini adalah kriterianya: kesenjangan rendah :  $IW < 0,35$ , kesenjangan sedang :  $0,35 \leq IW \leq 0,5$  dan kesenjangan tinggi :  $IW > 0,5$ .

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi ialah perekonomian yang dimana barang dan jasa diproduksi oleh masyarakat bertambah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi karena jika dilihat dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan perkapita terus menerus meningkat, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang belum tentu diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno, 2006).

Pemerataan yang adil di suatu negara berkembang ialah suatu kondisi yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2003).

Menyatakan jika pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan lebih cenderung memburuk tapi pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik pula. (Kuznets, 1955). menyatakan bahwa hubungan signifikan dan berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan kesenjangan. Hasil dari penelitian ini memberikan petunjuk untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kesenjangan pendapatan dibandingkan memberikan kontribusi atas kenaikan kesenjangan pendapatan (Ravalion dan Chen, 1997; Waluyo, 2006).

Pertumbuhan ekonomi daerah ialah adanya tambahan pendapatan dari setiap masyarakat secara keseluruhan pada daerah tersebut, dimana kenaikan ini seluruh nilai tambah terjadi. Perhitungan pendapatan daerah yang ada pada awalnya dibuat dengan harga berlaku. Untuk dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke waktu berikutnya yang harus dinyatakan dalam sebuah nilai riil yang dinyatakan dengan harga konstan (Tarigan, 2005).

Pertumbuhan ekonomi yang telah diterapkan belum tentu menghasilkan suatu pembangunan ekonomi dan peningkatan pada kesejahteraan pendapatan masyarakat, hal ini diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk meningkat dengan bersamaan (Sukirno, 2006). Jika

tingkat pertumbuhan ekonomi sering rendah dan tidak dapat melebihi pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat yang biasa disebut pendapatan perkapita akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sama, maka perekonomian negara tidak dapat mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat juga tidak mengalami kemajuan.

Tiga faktor utama pada pertumbuhan ekonomi ialah yang pertama, Akumulasi modal yang termasuk semua investasi yang berwujud lahan (tanah), peralatan fiscal maupun sumber daya manusia (Todaro dan Smith, 2006). Akumulasi modal terjadi apabila ada sebagian dari pendapatan sekarang disimpan kemudian diinvestasikan ulang untuk tujuan membesarkan output pada masa mendatang. Investasi ini disertai dengan investasi infrastruktur misalnya berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas komunikasi, fasilitas sanitasi, untuk menunjang aktivasi ekonomi produktif. Kedua, pertumbuhan penduduk maupun angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk maupun hal-hal yang memiliki hubungan terhadap kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) baik itu secara tradisional dianggap sebagai faktor positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila semakin banyak angkatan kerja maka semakin produktif pula tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk dapat meningkatkan potensi pasar domestik. Dan ketiga, kemajuan teknologi, kemajuan teknologi ini disebabkan karena teknologi dengan cara-cara baru dan cara yang lama diperbaiki dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tradisional.

Teori Harrod-Domar merupakan sebuah tambahan dari teori pertumbuhan ekonomi dimana pada teori ini yang dikembangkan dari Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar. Teori ini ialah sebuah perkembangan teori Keynes. Dasar pemikiran teori ini ialah analisis yang diaplikasikan oleh Keynes yang dianggap kurang lengkap karena tidak dapat membahas mengenai masalah-masalah ekonomi untuk jangka panjang. Harrod-Domar mencoba

menganalisis syarat-syarat yang dibutuhkan untuk perekonomian untuk tetap tumbuh dan berkembang pada jangka panjang (*steady growth*).

Pembangunan mempunyai tujuan yaitu pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal tersebut didasarkan pada teori *trickledown effect*. Teori *trickle-down effect* pertama kali dikembangkan oleh Albert Otto Hirschman. Teori tersebut menjadi salah satu topik penting didalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*) pada dekade 1950-an dan 1960-an. Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.

### **2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh sebab itu, sumber daya manusia sangat diperlukan agar dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan yang semakin meningkat (Hariandja, 2002).

Sumber daya manusia merupakan kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya (Hasibuan, 2003). Sumber daya manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal di sebuah organisasi dengan tujuan untuk memastikan

penggunaan keahlian manusia secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan keinginan (Mathis dan Jackson, 2006).

Akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan dalam menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif ialah syarat perlu (*necessary condition*) untuk pertumbuhan ekonomi. Teori klasik menganggap bahwa manusialah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa. Untuk melihat sumber daya manusia diukur dengan tingkat pendidikan. (Mulyadi, 2003).

Problema ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan suatu permasalahan jangka panjang, sehingga untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang pula. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan meningkatnya kualitas SDM, kesempatan untuk memasuki pasar kerja semakin meningkat sehingga mampu memiliki penghasilan lebih layak (Alisjahbana, 2012).

Lama waktu tempuh pendidikan untuk seseorang dapat mempengaruhi kualitas SDM. Perbedaan kemampuan antara individu satu dengan yang lainnya terjadi akibat dari perbedaan lama waktu sekolah dari setiap individu. Perbedaan kemampuan dan produktivitas individu ini dapat mempengaruhi perbedaan tenaga kerja dari keduanya. Pendidikan ialah faktor kunci dalam meningkatkan karir seseorang. Pendidikan mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing seseorang, sehingga dapat meningkatkan *bargaining position* individu dalam pasar tenaga kerja dan pada akhirnya memungkinkan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Hal ini memperkuat bahwa pendidikan merupakan faktor penentu dari tingkat upah, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan pendapatan. Sumber daya manusia ialah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan

menyinerjikan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya akan menganggur (*idle*) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2012).

Sumber daya manusia adalah pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses produksi. Untuk itu, atas pengorbanan dari tenaga kerja berhak memperoleh balas jasa dari perusahaan berupa upah. Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya akan menjadikan kompetisi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi sangat ketat.

Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja. Banyaknya penawaran tenaga kerja menjadikan tenaga kerja kelas bawah akan dibayar upah yang sedikit atau di bawah standar upah minimum. Banyaknya angka pengangguran akan menciptakan ketimpangan pendapatan di kelompok masyarakat. Kondisi ketimpangan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses layanan masyarakat terutama pendidikan yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak.

Teori neoklasik, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kualitas, kuantitas angkatan kerja dan penambahan modal (tabungan dan investasi) (Musfidar, 2012). Hal ini menekankan pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yaitu modal dan angkatan kerja. Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk di satu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi produksi, di sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga (Pangemanan, 2001). Peningkatan ekonomi daerah di berbagai sektor akan memberikan dampak positif, baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Tanggung jawab dari pemerintah sebagai motivator pembangunan nasional sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi lapangan kerja terbuka bagi masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan adanya perencanaan yang matang dari pemerintah sendiri. Jumlah penduduk yang bekerja adalah tenaga kerja yang sudah terserap oleh sektor- sektor perekonomian.

Penyerapan tenaga kerja ialah penduduk yang bisa bekerja pada usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang pencari kerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ataupun menganggur (Hidayat, 2014). Sedangkan menurut UU No, 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk memperoleh barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang telah terisi tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja ini terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan karena adanya permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan juga sebagai permintaan tenaga kerja, Kuncoro; Konadi, 2014).

Kesempatan kerja ialah banyaknya orang yang dapat memperoleh pekerjaan pada suatu perusahaan maupun suatu instansi (Desideria, Prihanto dan Hardiani, 2019). Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja bisa dikatakan peluang maupun keadaan yang dapat menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan hingga semua orang bersedia dan dapat bekerja dalam proses produksi dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) ialah keadaan yang menggambarkan pekerjaan (lapangan kerja untuk para pencari kerja). Hal inilah dimana kesempatan kerja diartikan sebagai permintaan tenaga kerja (Sekigawa, 2012).

Penyerapan tenaga kerja ialah jumlah tenaga kerja yang diserap untuk usaha tertentu. Kemampuan penyerapan dapat berbeda satu unit usaha dengan lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda pula (Indayati I dan Djumhariyati, 2010). Dampak penyerapan tenaga kerja ini dapat menjadi negatif karena kenaikan upah minimum yang besar tanpa mempertimbangkan modal dan pengeluaran agregat, (Neumark, Salas dan Wascher, 2014). Penyerapan tenaga kerja ini dipertimbangkan untuk fungsi produksi ialah substitusi. Perusahaan kemudian memilih untuk tidak menentukan upah minimum hingga memperkerjakan tenaga kerja dan menegosiasi ulang upah lebih rendah dengan sifat penyerapan tenaga kerja ialah pengganti tenaga kerja lain, pemanfaatan pengangguran, dan tenaga kerja yang bersifat kontrak (Cahuc, Marque dan Wasmer, 2008). Indonesia berupaya dalam melakukan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran negara merupakan pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai berbagai program pendukung kegiatan pemerintahan. dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum. Dibawah defisit fiskal, pengeluaran

pemerintah melebihi pendapatan pemerintah. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi pengeluaran, maka pemerintah menjalankan surplus fiskal. Dan, ketika pengeluaran sama dengan pendapatan, disebut sebagai balanced fiscal.

Dalam konteks ekonomi makro, government expenditure (pengeluaran pemerintah) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan:  $Y = C + I + G + (X-M)$  (Dumairy, 2006).

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta

dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2002).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Mangkoesebroto, 2002). Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono, 1998) : a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Basri, 2005). Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Mangkoesobroto, 2002): a. Perubahan permintaan akan barang publik; b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi; c. Perubahan kualitas barang publik; d. Perubahan harga faktor produksi.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan (Sukirno, 2006).

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Sukirno, 2006).

Oleh karena itu, menurut Mangkoesobroto (2002), di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: a. Peranan alokasi. Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta (private goods) dan barang publik (public goods). Barang swasta (private goods) adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar

yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Namun tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini dinamakan barang publik (public goods) sehingga perlu dialokasikan oleh negara, seperti contohnya prasarana jalan, pertahanan, pembersihan udara dan sebagainya, yang pengadaannya perlu peran negara (pemerintah) di dalamnya; b. Peranan distribusi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak progresif yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin.

Melalui subsidi, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran misalnya dengan memberikan kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk petani; c. Peranan stabilitas. Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

### **2.1.5 Upah Minimum**

Upah ialah salah satu dari alat motivator guna meningkatkan kerja yang dimana upah merupakan imbalan yang diterima setelah bekerja, semakin tinggi upah dapat meningkatkan produktivitas karyawannya. Upah yang dimaksudkan disini yaitu balas jasa yang berupa uang ataupun jasa lainnya diberikan organisasi atau lembaga pekerjanya. Pemberian upah ini untuk menjaga keberadaan karyawan di tempat kerjanya upah yang diberikan oleh

para pengusaha atau pemberi kerja secara teoritis dianggap sebagai pengganti dari tenaga yang dikorbankan pekerja guna kepentingan produksi.

Sehubungan dengan hal ini maka upah yang didapatkan pekerja dibedakan dengan dua jenis yaitu pertama upah nominal ialah sejumlah upah berupa uang yang didapatkan secara rutin oleh pekerja. Kedua, yaitu upah riil ialah kemampuan upah nominal yang didapatkan pekerja yang diukur dari banyaknya barang maupun jasa yang diukur dari banyaknya barang maupun jasa yang diperoleh dari pertukaran tersebut.

Pada beberapa negara upah minimum yaitu hal utama untuk penetapan upah nasional, yang tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum namun dapat juga mempengaruhi upah, meningkatkan pendapatan dan mempunyai dampak yang penting untuk disperse upah keseluruhan.

Upah minimum ialah upah yang telah ditetapkan secara minimum regional dan sub sectoral, (Sumarsono, 2003). Terkait hal ini upah minimum ialah upah pokok dan tunjangan. Sedangkan upah pokok minimum ialah upah pokok yang diatur baik itu regional, sectoral dan sub sectoral. Dalam peraturan Pemerintah diatur dengan jelas hanya upah pokoknya saja tidak terhitung tunjangan. Upah minimum ialah upah yang paling rendah yang mendapat izin untuk dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya (Case dan Fair, 2007).

Sasaran dari kebijakan upah minimum yaitu menutupi kebutuhan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Dalam mengukur keluarga dapat hidup layak maupun tidak maka dapat dilihat dari kesejahteraan pekerja dalam mendapatkan upah. Berdasarkan teori ekonomi, upah diartikan untuk pembayaran atas jasa-jasa fisik hingga mental yang telah disediakan tenaga kerja kepada para pengusaha dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dapat dibedakan antara pembayaran ke pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai yang tidak tetap (Sulistiawati, 2012).

Untuk yang bekerja di sektor formal yaitu target kebijakan upah minimum. Mereka yang bekerja tidak menerima upah di bawah upah minimum karena

adanya peraturan tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan dalam mematuhi peraturan apabila tidak dilakukan akan dikarenakan denda. Selain itu, upah minimum tidak hanya sebagai alat guna melindungi pekerja di bagian bawah skala upah namun sering juga untuk “isu kelas menengah” (Levin-Waldman, 2011).

Pada saat yang sama, upah minimum digunakan dengan hati-hati untuk instrumen anti kemiskinan karena adanya dampak yang bergantung pada distribusi lapangan kerja pada tingkat rumah tangga. Hal ini membuat mereka tidak dapat dipakai untuk mengukur tingkat upah pada target grup tertentu. Keseimbangan harus dipastikan saat menetapkan upah minimum. Apabila ditetapkan terlalu rendah, kemungkinan akan kehilangan targetnya. Ketika terlalu tinggi dari nilai upah rata-rata, kemungkinan dapat mencegah perusahaan mempekerjakan pekerja yang berketerampilan rendah atau dapat mendorong dalam mempekerjakan mereka secara informal (ILO, 2011).

Secara teoritis, efek dari upah minimum bermacam-macam bergantung pada model pasar tenaga kerja yang mewakili suatu kondisi sebenarnya. Apabila upah dan pekerjaan tetap, maka dalam pasar tenaga kerja yang akan dapat menghasilkan pengurangan jumlah lapangan pekerjaan, yang dimana besarnya bergantung pada kenaikan upah yang sesungguhnya ( $WM-W^*$ ) dan pada elastisitas permintaan tenaga kerja. Penegakan dari upah minimum yang diatur di atas batas upah pasar ( $W^*$ ) akan dapat mengakibatkan adanya penurunan permintaan ataupun kelebihan pasokan tenaga kerja.

Tipe lain dari pasar tenaga kerja ialah pasar tenaga kerja monopsonistik. Pada pasar tenaga kerja monopsonistik, permintaan tenaga kerja masih identik dengan margin produksi tenaga kerja, namun kurva penawaran yang relevan digambarkan dengan kurva biaya marjinal produksi. Perbedaan antara kedua jenis pasar tenaga kerja ini ialah dilihat dari tingkat eksploitasi di pasar tenaga kerja yang monopsonistis. Hal inilah yang mencerminkan situasi dimana kontribusi pekerja agar perusahaan tidak tepat diakui.

Tingkat keuntungan maksimum dari suatu tenaga kerja ialah  $L_c$  dimana biaya marjinal sama dengan permintaan dari tenaga kerja. Mekanisme ini menghasilkan tingkat upah yang memaksimalkan sebuah keuntungan di titik  $W_p$ , sementara upah monopsoni hanya pada titik  $W_q$ . Oleh sebab itu jelas bahwa upah minimum yang telah ditetapkan diantara tingkat upah ( $W_q$ ) dan tingkat upah kompetitif ( $W^*$ ) akan dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih tinggi. Pemerintah harus menetapkan upah minimum lebih tinggi dari tingkat kompetitif  $W^*$ , kebijakan ini kemudian akan menghasilkan pengurangan tenaga kerja sesuai yang terjadi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif.

Pada model kompetitif yang sangat sederhana di pasar tenaga kerja, efek dari upah minimum yang sangat bergantung pada serangkaian variabel institusional, yang termasuk tingkat kepatuhan, penegakan hukum, hukuman atas ketidakpatuhan dan keberadaan dari sektor-sektor tertentu. Tentunya masalah ini lebih mungkin terjadi di negara-negara yang berkembang.

Perbedaan tingkat upah juga menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penetapan upah minimum yang bertujuan untuk melindungi para pekerja mendapatkan upah yang layak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sungkar, Nazamuddin, dan Nasir (2015) menunjukkan hasil bahwa penetapan upah minimum akan menciptakan ketimpangan pendapatan.

Diberlakukannya upah minimum berdampak pada tarif tenaga kerja akan meningkat, sehingga permintaan akan tenaga kerja akan berkurang. Akibatnya banyak tenaga kerja yang akan menganggur. Pengangguran akan menciptakan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Jadi peraturan penetapan upah minimum oleh pemerintah dapat melindungi tenaga kerja serta dapat menciptakan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

### 2.1.6 Infrastruktur Fisik

Hingga saat ini belum ada definisi yang pasti soal infrastruktur, namun ada beberapa kesepakatan yang luas yang menyangkut infrastruktur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infrastruktur diartikan sebagai sarana maupun prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jembatan, jalan, sanitasi, telepon, dsb. Infrastruktur ialah elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi suatu arus barang dan jasa antara pembeli maupun penjual (Pearce, 1986).

Pada hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom mengeluarkan pendapatnya soal infrastruktur. Infrastruktur sebagai sesuatu yang diperlukan (Hirschman, 1958). Tanpa adanya infrastruktur, kegiatan produksi di berbagai sektor kegiatan industri tidak berfungsi. Infrastruktur sebagai salah satu faktor yang penting dalam menentukan pembangunan ekonomi (Michael P. Todaro dan Smith, 2006).

Infrastruktur dibagi 3 golongan yaitu yang pertama Infrastruktur ekonomi (fisik) ialah asset fisik dalam menyediakan jasa yang dimanfaatkan dalam produksi maupun konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, minum, air, gas, listrik dan sanitasi), *public works* (bendungan, drainase dan saluran irigasi) dan sektor transportasi (jalan, kereta api, lapangan terbang dan angkutan Pelabuhan) Kedua yaitu Infrastruktur sosial ialah asset yang mendukung kesehatan maupun keahlian masyarakat mencakup pendidikan (sekolah, perpustakaan), kesehatan (pusat kesehatan, rumah sakit) dan untuk rekreasi (museum, taman dan lainnya). Dan yang terakhir Infrastruktur administrasi/insitansi mencakup penegakan hukum, koordinasi, control administrasi dan kebudayaan. (World Bank Report World Bank, 1994).

Dalam pembahasannya infrastruktur diartikan memiliki sifat sebagai barang publik. Barang publik memiliki dua ciri utama dari sisi penggunaan konsumsi barang publik yaitu *rivalry* dan *excludable*. *Rivalry* ialah sifat rivalitas maupun persaingan dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan suatu

barang. Artinya ialah apabila suatu barang digunakan oleh pengguna, maka barang tersebut dapat digunakan oleh pengguna lainnya. Apabila seseorang yang menggunakan satu barang dan persaingan tidak terjadi dengan orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut, maka inilah yang disebut barang publik. *Excludable* ialah sifat menghalangi seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Maknanya, keinginan seseorang dalam menggunakan suatu barang dapat dihalangi oleh pemasok. Dengan kata lain, jika konsumsi seseorang pada penggunaan suatu barang tidak dapat dibatasi pihak lain, maka barang tersebut dapat dikatakan barang publik.

Barang publik murni ialah barang yang dimana *marginal costs* penyediaannya yaitu nol dari penambahan penggunaan (*non-rivalry*) dan tidak memungkinkannya menghalangi seseorang mengkonsumsi barang tersebut (*non-excludable*) (Stiglitz, 2000). Pertahanan nasional ialah salah satu contoh dari barang publik murni (*Pure Public Good*). Tetapi banyak dari barang publik yang disediakan pemerintah bukan merupakan barang publik murni. Infrastruktur seperti jalan adalah salah satu barang publik yang disediakan pemerintah yang bukan merupakan barang publik murni (*impure public goods*). Hal ini diakibatkan *marginal costs* yang kecil tapi tidaklah nol.

Infrastruktur sebagai barang publik maka infrastruktur tersebut mempunyai dampak eksternalitas positif (Stiglitz, 2000). Definisi eksternalitas ini sendiri yaitu suatu kondisi dimana tindakan perusahaan ataupun individu mempunyai dampak terhadap individu ataupun perusahaan yang lain tanpa harus membayar dampak tersebut. Sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan pemerintah, pihak yang menggunakan infrastruktur tidak dapat memberikan bayaran secara langsung untuk penggunaan infrastruktur. Penelitian di USA mengatakan bahwa infrastruktur dapat menghasilkan eksternalitas positif. Sekolah, jalan, rumah sakit, sekolah, fasilitas air, listrik maupun infrastruktur non militer lainnya memiliki dampak positif untuk produktivitas output. Eksternalitas positif dari infrastruktur ialah

adanya *spillover effect* dalam suatu bentuk peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dan tanpa perusahaan tersebut harus meningkatkan input modal maupun tenaga kerja (Munnell, 1992).

Secara teoritis dan empiris, infrastruktur diyakini mampu mempersempit ketimpangan pendapatan (Calderon dan Servén, 2004; Chong dan Calderon, 2004; Kannan et al., 2018). Namun demikian, beberapa studi empiris menemukan bahwa infrastruktur dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena distribusi pengembalian yang tidak merata (Bajar dan Rajeev, 2016; Majumder, 2012).

Sejumlah penelitian menemukan hasil yang bertentangan mengenai hubungan ketimpangan pendapatan infrastruktur. Infrastruktur fisik dalam jangka panjang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan terbalik yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan (Calderon dan Servén, 2004). Sementara itu, infrastruktur fisik ternyata berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di India (Bajar dan Rajeev, 2016; Majumder, 2012) dan Indonesia (Makmuri, 2017). Ketimpangan pendapatan infrastruktur fisik yang positif kemungkinan disebabkan oleh ketidaksetaraan pengembalian infrastruktur fisik antara si kaya dan si miskin (Bajar dan Rajeev, 2016; Makmuri, 2017). Dibandingkan dengan orang miskin, orang kaya mungkin mendapat untung lebih banyak dari infrastruktur fisik (Koki, 2011; Serikat Bangsa, 2016). Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik dikatakan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena mendorong “perubahan teknologi, globalisasi, dan reformasi berorientasi pasar” yang mungkin menguntungkan pekerja berketerampilan tinggi (Zhuang dkk., 2014).

Sesuai dengan hasil empiris tersebut, infrastruktur fisik seperti transportasi, telekomunikasi, dan listrik berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia (Makmuri, 2017). Perbedaan dampak infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di setiap negara dapat

dijelaskan oleh pengaruh tingkat awal ketimpangan pendapatan, tahap pembangunan, dan tingkat pembangunan infrastruktur (Tian & Li, 2019).

Pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan (Makmuri, 2017). Infrastruktur fisik mengacu pada beberapa macam infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan listrik secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Torrison, 2009). Secara umum infrastruktur fisik ditemukan dapat secara tidak langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui akumulasi modal fisik dan pertumbuhan ekonomi (Calderon dkk, 2014, Calderon dan Servén, 2004). Jalan dianggap perlu untuk mempersempit ketimpangan pendapatan dengan memperbesar pasar, meningkatkan produktivitas, mempromosikan kesempatan kerja, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan meningkatkan taraf hidup (Charlery dkk, 2016 ; Hooper dkk, 2018 ; Bank Dunia, 2016). Demikian pula, telekomunikasi dan listrik juga telah diamati untuk meningkatkan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi seperti berbagi informasi dan teknologi, produksi, dan pasar tenaga kerja (Koki, 2011 ; Roller dan Waverman, 2001).

Selain memperkirakan dampak infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan, penting untuk menggambarkan tingkat pembangunan infrastruktur masing-masing provinsi di Indonesia. Bukti empiris tentang hubungan investasi infrastruktur-ketidaksetaraan beragam dan cukup bertentangan (Chatterjee dan Turnovsky, 2012). Di satu sisi, beberapa studi menemukan bahwa investasi publik telah mendorong pertumbuhan dan berkontribusi terhadap pengentasan ketimpangan, (Ferranti et al., 2004 ; Fan dan Zhang, 2002 ; Calderon dan Servén , 2004, 2008, dan 2014 ; Seneviratne dan Sun, 2013 ; Raychaudhuri dan De, 2010). Di sisi lain, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur telah meningkatkan disparitas regional di Eropa (Brakman, Garretsen dan Van Marrewijk, 2002). Investasi publik yang

berlebihan sebagai faktor yang berkontribusi. meningkatnya ketimpangan pendapatan di Afrika (Artadi dan Martin, 2003).

Infrastruktur telah menjadi tema umum di berbagai bidang perdebatan kebijakan. Misalnya, penelitian berpendapat bahwa akses umum ke layanan infrastruktur memainkan peran kunci dalam membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan latar belakang ini, ada persepsi yang berkembang bahwa di banyak negara tekanan konsolidasi fiskal telah menyebabkan kompresi belanja infrastruktur publik, yang belum diimbangi dengan peningkatan partisipasi sektor swasta, sehingga mengakibatkan penyediaan layanan infrastruktur yang tidak mencukupi. dengan potensi dampak merugikan yang besar terhadap pertumbuhan dan ketimpangan.

Pada infrastruktur untuk mengatasi tingginya korelasi yang sering ditemukan di antara berbagai indikator infrastruktur. Pertama dan terpenting adalah pengaruh berbagai indikator infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi dan listrik terhadap ketimpangan pendapatan (Calderon dan Servén, 2004, 2008 dan 2014). Dalam penelitiannya membangun indeks sintetik yang merangkum kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur ini. Salah satu alasan mengapa Calderón & Servén (2004, 2008, dan 2014) menyusun indeks sintetik ini adalah karena indeks ini mampu menggabungkan informasi dari berbagai sektor infrastruktur, indeks ini juga membantu mengatasi masalah kolinearitas yang tinggi di antara masing-masing indikator. Ketimpangan pendapatan dapat mencegah masyarakat miskin mengakses layanan infrastruktur, sementara pada saat yang sama infrastruktur yang tidak memadai dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.

### **2.1.7 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Per Kapita**

Penanaman modal ataupun lebih sering disebut investasi ini memiliki banyak pengertian yang berbeda dari para pakar ekonomi. Investasi ialah pengeluaran secara keseluruhan meliputi pengeluaran dalam membeli bahan

baku, mesin dan peralatan pabrik dan semua peralatan modal lain yang diinginkan dalam proses produksi (Nanga, 2005). Pengeluaran untuk pabrik tempat tinggal karyawan, bangunan kantor dan bangunan konstruksi lainnya. Perubahan nilai barang cadangan akibat dari perubahan jumlah juga harga.

Dalam teori investasi Harrod-Domar, investasi ialah faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar dalam pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang dapat menambah kemampuan dalam perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa, namun dapat juga meningkatkan permintaan efektif masyarakat.

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Sebagai salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi menempati posisi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai pembantuan modal tetap bruto, pengertian investasi mencakup kegiatan tentang pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah, yang digunakan untuk proses produksi di dalam negeri/wilayah tersebut. Barang-barang yang dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai unsur pemakaian satu tahun atau lebih, dan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat tetap dalam proses produksi.

Singkatnya, investasi dapat diartikan untuk tambahan bersih stok kapital yang telah ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain investasi yaitu pemupukan modal (*capital formation*) ataupun akumulasi modal (*capital accumulation*) (Nanga, 2005). Investasi tidak berarti obligasi, pembelian

saham ataupun asset keuntungan lainnya. Investasi dari belanja untuk rumah baru, pabrik dan peralatan baru, kenaikan persediaan netto. Investasi usaha meliputi pembelian barang kapital yang saat ini atas ekspektasi adanya penerimaan untuk masa pendatang (McEachern, 2000).

Investasi ialah komitmen dari sejumlah dana maupun sumber daya lainnya yang dilaksanakan pada saat ini, yang tujuannya untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa mendatang. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat secara terus menerus dalam meningkatkan kegiatan ekonomi maupun kesempatan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional (Sukirno, 2004). Peranan ini berasal dari dua fungsi yang penting dari kegiatan investasi yaitu: Pertama, Investasi ialah salah satu komponen dari pengeluaran agregat, hingga terjadi kenaikan investasi yang akan meningkatkan permintaan agregat, karena hal ini investasi dapat meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kedua, Pertambahan barang modal untuk akibat investasi yang akan menambahkan kapasitas produksi.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2006). Todaro (2000) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya. Pengaruh pengeluaran

pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan tergantung dari pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Apabila porsi dana pengeluaran lebih besar untuk belanja barang dan jasa daripada belanja pegawai maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan perbaikan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah (Dhyatmika, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu dari tujuan Desentralisasi adalah mengoreksi horizontal imbalance, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme block grant/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Dengan diberlakukannya desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pengeluaran pemerintah daerah yang ada dalam APBD. Sesuai dengan peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan peran dinamisasi, maka pengeluaran pemerintah daerah harus dilandaskan pada peran-peran tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (2008) bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan,

pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan Sucihati (2014) mengemukakan bahwa semakin besar rasio pengeluaran pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berkorelasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

### **2.2.2 Hubungan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika upah minimum berada di atas tingkat keseimbangan upah, maka kuantitas penawaran tenaga kerja akan melebihi jumlah permintaan, sehingga terjadi pengangguran. Walaupun upah minimum meningkatkan penghasilan pekerja namun mengurangi kesempatan calon pekerja untuk memperoleh pekerjaan bahkan dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja lainnya. Dampak dari upah minimum terhadap pekerja tergantung pada keahlian dan pengalaman pekerja. Pekerja dengan keahlian yang tinggi dan pengalaman bekerja yang cukup lama biasanya tidak terpengaruh atas kenaikan upah minimum tersebut karena mereka memiliki keseimbangan tingkat upah yang berada di atas tingkat upah minimum.

Hubungan antara kebijakan upah minimum dengan penurunan tingkat kemiskinan bersifat positif. Peningkatan upah minimum diharapkan dapat mampu memperbaiki kesejahteraan para pekerja, mereduki kesenjangan

dengan meningkatkan pendapatan untuk kalangan pekerja rendah (Alaniz, Gindling dan Terrel, 2011).

Beberapa faktor yang mempengaruhi upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan yaitu pertama, pekerja yang penghasilannya kurang dari upah minimum akan menjadi kurang dipekerjakan atau dipekerjakan tetapi dengan jumlah jam kerja yang lebih sedikit. Hilangnya pekerjaan upah rendah akan cenderung membuat distribusi upah terukur lebih setara. Pekerja memiliki peringkat keterampilan (*skill*) sehingga dari sisi permintaan, upah pekerja yang lebih tinggi diasumsikan lebih produktif daripada yang upahnya lebih rendah. Dalam persaingan kualitas, pekerja dengan upah yang lebih tinggi dipekerjakan untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi guna mencapai *marginal revenue product* (MRP). Disisi lain upah minimum terlihat seperti mengeliminasi tenaga kerja dengan kualitas rendah (Pettengil, 1981).

Kedua, pekerja yang penghasilannya kurang dari upah minimum akan didorong berprestasi hingga mencapai upah minimum sehingga akan menyebabkan lonjakan dalam distribusi upah. Pekerja dengan keterampilan rendah (yang mungkin akan kehilangan pekerjaannya) meningkatkan usahanya, maka yang awalnya memiliki tingkat keterampilan yang berbeda pada akhirnya bisa mencapai tingkat produktivitas yang sama yang menyebabkan lonjakan pada upah minimum (usaha bersifat endogen) (Pettengil, 1981).

Ketiga, upah pekerja dengan upah rendah yang tidak tercakup dalam upah minimum akan ditingkatkan atau dikurangi. Pada saat ada kebijakan upah minimum, jika harga keterampilan tetap, maka akan menyebabkan pengusaha di sektor tertutup (*covered sector*) akan melepaskan semua pekerja yang pendapatannya kurang dari upah minimum,  $W_c < W_m$ . Namun, hal ini akan mengurangi keterampilan pasokan (*supply skill* pada sektor tertutup yang menyebabkan meningkatnya harga keterampilan di sektor tertutup) (Heckman dan Sedlacek, 1981). Peningkatan harga keterampilan

tersebut akan meningkatkan upah yang ditawarkan, yaitu naik atau di atas upah minimum dan menarik upah yang awalnya di *uncovered sector* (upah yang awalnya harga  $W_c$  sedikit di bawah  $W_u$ ). Harga upah pada *uncovered sector* bisa turun atau naik, tetapi relatif turun terhadap harga keterampilan di sektor tertutup.

Keempat, kenaikan upah pekerja yang terkena dampak langsung akan menyebabkan efek substitusi dan ini cenderung meningkatkan permintaan pekerja yang mampu menghasilkan upah tepat di atas minimum. Kenaikan upah minimum akan menaikkan harga relatif pekerja tidak terampil dan mendorong substitusi input pekerja lebih atraktif. Pekerja kelompok upah rendah yang mendapatkan sedikit lebih banyak dari upah minimum sering melakukan tugas yang sama dengan tugas pekerja yang kurang terampil sehingga kemungkinan akan menjadi pekerja substitusi upah minimum yang sangat baik. Oleh karena perusahaan akan menggunakan input non tenaga kerja lebih banyak, maka total kesempatan kerja akan turun sebagai respons terhadap kenaikan upah minimum. Upah pekerja substitusi tersebut akan terus meningkat dan lebih banyak lagi yang bisa ditarik ke dalam angkatan kerja. Oleh karena adanya sensitivitas produktivitas terhadap keterampilan, ada substitusi yang lebih besar antara pekerja yang tingkat keterampilannya sangat dekat dari pada antara yang sangat berbeda tingkat keterampilannya (Brown, 1999).

Kelima, upah minimum memiliki dampak tidak langsung bagi yang berada pada distribusi upah atas, meskipun diasumsikan dampak adalah kecil. Adanya spillover konsisten dengan tujuan dari kebijakan upah minimum, yaitu menaikkan upah bagi pekerja untuk mendapatkan upah minimum. Satu perspektif beranggapan bahwa jika menaikkan upah bagi pekerja untuk mendapatkan upah minimum adalah hal yang baik, maka meningkatkan upah orang-orang yang menghasilkan sedikit lebih dari upah minimum juga akan

dipandang sesuatu yang baik. Dari perspektif lain, spillovers dapat diartikan sebagai meningkatnya permintaan akan pendapatan yang lebih baik.

Adanya pergeseran permintaan tenaga kerja naik maka keseimbangan upah pun meningkat dan jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa apabila permintaan produksi naik maka harga output akan ikut naik juga, sehingga dapat mempengaruhi penambahan tenaga kerja dan diikuti meningkatnya upah (Mankiw, 2013). Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat akan memiliki efek terhadap pendapatan masyarakat. Kemudian pada akhirnya meningkatkan daya beli dari masyarakat dan menyebabkan permintaan barang dan jasa menjadi lebih besar, sehingga dapat mendorong produsen dalam memproduksi lebih banyak lagi. Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan ketimpangan akan menurun.

Penelitian ini juga didukung oleh perspektif Keynesian yaitu bahwa upah minimum yang lebih tinggi jika mendistribusikan kembali pendapatan, meningkatkan daya beli dan dengan demikian menghasilkan peningkatan permintaan barang-barang konsumsi (Levitan dan Beolus, 1979; Prasch 1996). Menurut pandangan ini, redistribusi pendapatan meningkatkan kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi yang memiliki efek meningkatkan lapangan kerja untuk penyerapan tenaga kerja karena cara utama untuk memenuhi peningkatan permintaan agregat yaitu dengan mempekerjakan lebih banyak pekerja (Brown, 1940). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan hasil bahwa variabel upah minimum memiliki efek positif terhadap nilai ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode 1999 – 2013 (Sungkar, Nazamuddin dan Nassir, 2015).

### **2.2.3 Hubungan Infrastruktur Fisik Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Secara teoritis dan empiris, infrastruktur diyakini mampu mempersempit ketimpangan pendapatan (Calderon dan Servén, 2004 ; Chong dan Calderon, 2004 ; Kannan et al., 2018). Namun demikian, beberapa studi empiris menemukan bahwa infrastruktur dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena distribusi pengembalian yang tidak merata (Bajar dan Rajeev, 2016 ; Majumder, 2012).

Ketimpangan pendapatan infrastruktur fisik yang positif kemungkinan disebabkan oleh ketidaksetaraan pengembalian infrastruktur fisik antara si kaya dan si miskin (Bajar dan Rajeev, 2016 ; Makmuri, 2017). Dibandingkan dengan orang miskin, orang kaya mungkin mendapat untung lebih banyak dari infrastruktur fisik (Koki, 2011 ; Serikat Bangsa, 2016). Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik dikatakan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena mendorong “perubahan teknologi, globalisasi, dan reformasi berorientasi pasar” yang mungkin menguntungkan pekerja berketerampilan tinggi (Zhuang dkk., 2014).

Sesuai dengan hasil empiris tersebut, bahwa infrastruktur fisik seperti transportasi, telekomunikasi, dan listrik berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia (Makmuri, 2017). Perbedaan dampak infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di setiap negara dapat dijelaskan oleh pengaruh tingkat awal ketimpangan pendapatan, tahap pembangunan, dan tingkat pembangunan infrastruktur (Tian dan Li, 2019).

Peningkatan daya saing China yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur fisik yang masif (Chatterjee, 2005 dan Straub et al., 2008). Dampak pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan penyerapan sumber daya manusia yang kemudian membantu dalam peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas (Brenneman dan Kerf, 2002 ; Agenor dan Moreno-Dodson, 2006).

Jika infrastruktur dikembangkan di daerah yang kekurangan fasilitas dan menghadapi krisis sumber daya, daerah ini dapat memanfaatkan kemungkinan produksi baru dan ini akan membantu mengurangi ketimpangan (Ferreira, 1995). Dalam lingkungan dengan ketidaksempurnaan pasar modal, perluasan layanan infrastruktur publik mengurangi ketidaksetaraan peluang di antara pengusaha, meningkatkan pengembalian investasi, dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan di antara segmen masyarakat yang kurang disukai (Ferreira, 1995).

Rumah tangga dengan akses listrik membebaskan waktu yang dihabiskan untuk memasak dan penerangan dan waktu ekstra ini dihabiskan untuk bekerja melalui wirausaha atau usaha mikro. Selain saluran konvensional yang melaluinya infrastruktur berdampak pada perekonomian, literatur juga telah mengidentifikasi saluran baru seperti dampak pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kemudian membantu dalam peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas (Brenneman dan Kerf, 2002 ; Agenor dan Moreno-Dodson, 2006).

Pengeluaran per kapita untuk layanan sosial oleh pemerintah negara bagian terbukti berdampak negatif pada ketimpangan. Hal ini karena negara-negara berpenghasilan rendah yang menyoroti pentingnya peran pemerintah serta program sosial yang ditargetkan yang dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya untuk semua dan bukan hanya "beruntung". sedikit dalam suatu masyarakat (Bajar dan Rajeev, 2016).

#### **2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang didalam peningkatan proses produksi. Investasi memiliki peran aktif dalam menentukan

tingkat output, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju investasi (Arsyad, 1999). Sesuai dengan teori, investasi akan memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi naiknya pendapatan yang diterima masyarakat (Sun'an dan Astuti, 2008). Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka pendapatan cenderung membaik, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Di daerah yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lambat maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Dengan perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan – perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004). Penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan jumlah barang modal dalam perekonomian akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa mendatang. Salah satu faktor penting pembentukan modal atau investasi menurut Harrod Domar adalah pembentukan modal atau investasi.

Investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah. Sebagai akibat yang akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut

akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan jika sebagian besar ditopang oleh kegiatan investasi, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali (Rimbawan, 2010 ; Adipuryanti, 2015).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Karena adanya investasi maka dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagai akibat yang akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut dan akan menambah output nasional sehingga secara otomatis mengurangi ketimpangan pendapatan.

Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan.

Teori Harrod-Domar menyebutkan bahwa rendahnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut berkurang karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeniwati

(2013) bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Provinsi di Sumatera.

Kegiatan investasi ialah memungkinkan masyarakat secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional hingga meningkatkan pendapatan nasional juga meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Penurunan investasi ini dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional yang menurun di bawah kapasitas pendapatan nasional. Peningkatan investasi kemudian masuk ke dalam daerah yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006). Analisis regresi linear dalam wujud Structural Equation Modelling (SEM), menemukan Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, dengan masing-masing signifikansi empirik ( $p$ )  $t$  sebesar 0,232 ( $> 0,05$ ) (Islamiah et al, 2021).

### **2.2.5 Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap ketimpangan pendapatan bahwasanya manusia sebagai suatu bentuk modal dalam berinvestasi dimasa depan yang mencakup di dalamnya yaitu terdiri dari tingkat pendidikan, pengetahuan, tingkat kesehatan masyarakat, dan skill (keterampilan) merupakan suatu bentuk dari pada modal manusia (Schultz, T.W, 1961).

Berinvestasi didalam bentuk modal manusia akan dapat memberikan tingkat pengembalian serta pengeluaran yang lebih baik dimasa depan. Investasi dalam bentuk modal manusia bertujuan untuk mengembangkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas manusia pendidikan serta dapat meningkatkan keterampilan yang tinggi, sehingga nantinya akan menjadi suatu nilai tambah bagi suatu perusahaan. Berdasarkan uraian diatas teori ini

menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan penghasilan atau upah seseorang yang akan bekerja dimasa depan.

Perbedaan kemampuan antara individu satu dengan yang lainnya terjadi akibat dari perbedaan lama waktu sekolah dari setiap individu. Perbedaan kemampuan dan produktivitas individu ini dapat mempengaruhi perbedaan tenaga kerja dari keduanya. Pendidikan ialah faktor kunci dalam meningkatkan karir seseorang. Pendidikan mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing seseorang, sehingga dapat meningkatkan *bargaining position* individu dalam pasar tenaga kerja dan pada akhirnya memungkinkan individu untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Hal ini memperkuat bahwa pendidikan merupakan faktor penentu dari tingkat upah, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan pendapatan.

Salah satu faktor yang menentukan kesempatan kerja adalah tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang menunjukkan semakin baik kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri sehingga mampu terserap ke dalam dunia kerja selain itu juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan (Hasiani dkk, 2015).

Analisis regresi jalur, menemukan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi selama periode waktu 2002-2016, dengan koefisien regresi sebesar 0,857 dan signifikan empirik ( $p$ )  $t$  sebesar 0,059 ( $< 0,1$ ). Pola hubungan yang dipakai adalah linier-linier (Damanik et al, 2018).

Analisis Vector Autoregression (VAR), menemukan pekerja berpendidikan SMA ke atas berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2010-2017 dengan koefisien regresi sebesar -0,015 dan signifikan empirik ( $p$ )  $t$  sebesar -1,872 ( $< 0,01$ ) (Ahmad dan Triani, 2018).

Analisis regresi jalur, menemukan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Brazil, China, Jerman, India, Spanyol, dan Amerika Serikat pada tahun 1988-2018 dengan koefisien sebesar -0,61 serta signifikan empirik ( $p$ )  $t$  sebesar 0,000 ( $< 0,01$ ). Pola hubungan yang digunakan adalah linier-linier (Rao et al., 2019).

Analisis regresi data panel dan Kurva Great Gatsby, menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di semua Negara pada tahun 1950-1985, dengan koefisien sebesar -0,50 serta signifikan empirik ( $p$ )  $t$  sebesar 0,04 ( $< 0,05$ ). Pola hubungan yang digunakan adalah linier-linier. (Jerrim dan Macmillan, 2015).

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari dua ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah (Todaro, 2000). Kemudian menurut Ahluwalia (1997) yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah dan 20 persen menerima pendapatan yang paling tinggi.

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryono, 2000). Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, konstruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun

ketersediaannya lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Estudilo Jonna P (1997), yang melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Filipina, dimana dari hasil penelitian menemukan ada pengaruh antara populasi/ penduduk dengan distribusi pendapatan dan selain itu pendapatan dari upah yang memiliki kontribusi dalam mempengaruhi distribusi pendapatan. Lebih lanjut penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Dimana dari hasil penelitian yang menemukan kenaikan proporsi penduduk secara signifikan akan menurunkan distribusi pendapatan, kemudian proporsi anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri akan meningkatkan distribusi pendapatan rumah tangga. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan distribusi pendapatan rumah tangga, walaupun pertumbuhan ekonomi terus meningkat (Lyndon, Pangemanan, 2001).

Hasil ini diperkuat bahwa dampak dari kegiatan pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu memberikan sumbangan terhadap penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan masyarakat serta pemerataan pembangunan sehingga menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan (Cohen, 1984).

#### **2.2.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa

yang menciptakan pertumbuhan. Jika sebagian kecil orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat, selanjutnya akan menurun yang dikenal dengan hipotesis U terbalik.

Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan, terutama pada pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan dengan kausalitas dua arah. Pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan. Artinya ketika awal pertumbuhan, ketimpangan akan meningkat dan kemudian menurun seiring waktu. Situasi ini disebut hipotesis U terbalik Kuznets (Kuznets, 1955). Perpindahan tenaga kerja dari bidang pertanian ke bidang industri (Barro, 2000).

Dengan model ini, sektor pertanian dan pedesaan pada awalnya merupakan bagian terbesar dari semua kegiatan ekonomi. Sektor ini memiliki karakteristik pendapatan per kapita yang rendah dan ketimpangan internal yang rendah. Pada saat yang sama, sektor industri dan sektor perkotaan dimulai dari sektor-sektor kecil, dengan pendapatan per kapita yang tinggi, dan ketimpangan yang tinggi di sektor-sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan beralihnya pekerja dan sumber daya dari sektor pertanian ke sektor industri. Para pekerja yang berpindah mengalami peningkatan penghasilan per kapita, dan transformasi ini menaikkan ketimpangan dalam perekonomian secara umum. Sebagai konsekuensinya, pada tahap mula pertumbuhan, hubungan antara penghasilan per kapita dan ketimpangan cenderung positif.

Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketidakmerataan antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumber daya dan

kapital oleh 29 para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya non pemilik modal akan tetap berada dalam keadaan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan juga naik, dimana terdapat hubungan yang sejalan positif (Arif and Wicaksani, 2017). Berbeda dengan penelitian Huang et al. (2015) menjelaskan bahwasanya terdapat pengaruh searah (positif) serta (negative) pada variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel ketimpangan pendapatan. Apabila terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan hal tersebut dapat berlaku pada negara berpendapatan tinggi, sedangkan terdapatnya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan hal itu dapat berlaku pada negara yang berpendapatan rendah.

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan jumlah akan produksi barang maupun jasa disetiap daerah yang berdampak kepada meningkatnya jumlah output disuatu daerah. Dengan semakin melimpahnya atau banyaknya output yang dihasilkan maka penghasilan atau upah yang diperoleh masyarakat akan meningkat yang berada di suatu daerah atau negara dan dengan bertambahnya pendapatan perkapita sehingga nantinya ketimpangan pendapatan antar daerah semakin rendah dan terkendali (Kurniasih, 2013).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan tersebut. Apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika sebagian kecil orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Sebaliknya jika sebagian besar yang turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan *gap* antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil, (Todaro, 2006).

Konsep yang disampaikan (Todaro dan Smith, 2006) bahwa karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) sebagai penentu apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap masyarakat miskin atau tidak. Karakter tersebut terbangun melalui bagaimana cara pencapaiannya. Karakter pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah pertumbuhan berbasis sektor modal, dengan sektor pariwisata sebagai sektor prioritasnya. Ini berarti bahwa sektor pariwisata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diikuti oleh penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan terbagi atas dua macam, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka panjang mungkin berbeda dari efek jangka pendek. Dengan mengadopsi semi- metode parametrik, pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan untuk semua negara dalam jangka pendek dan jangka menengah (Chambers, 2010). Adapun efek jangka panjang, ekonomi pertumbuhan mengurangi ketimpangan di negara berkembang tetapi memiliki efek sebaliknya di negara maju. Kedua, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan tidak konsisten karena perbedaan penentuan modal. Misalnya dengan mengambil *trade openness* dan modal manusia sebagai penentu ketimpangan, di Tunisia, pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan ketimpangan. Selanjutnya, perdagangan keterbukaan diperburuk dan modal manusia mengurangi tingkat ketidaksetaraan (Wahiba dan El Weriemi, 2014). Di sisi lain, mengambil volatilitas pertumbuhan dan modal manusia sebagai penentu ketidaksetaraan, Pertumbuhan memiliki dampak negatif pada ketimpangan pendapatan. Pada saat yang sama, dia mengidentifikasi bahwa volatilitas yang lebih tinggi dalam pertumbuhan dapat membahayakan ketimpangan pendapatan sepanjang waktu, tetapi besarnya efek volatilitas dalam pertumbuhan menurun dari waktu ke waktu (Binatli, 2012).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. Sedangkan menurut penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019 (Banowati, 2021).

Temuan penelitian yang menyajikan bukti empiris adanya pengaruh negatif ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sesuai dengan temuan penelitian (Forbes, 2000 dan Frank, 2009). Ketimpangan pendapatan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan (Ali, 2014). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan ketimpangan (Fajri, 2016). Hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan kesenjangan (Ravalion dan Chen, 1997). Hal ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kesenjangan pendapatan, daripada memberikan kontribusi atas kenaikan kesenjangan pendapatan (Waluyo, 2004). Penelitian Waluyo juga sejalan dengan penelitian Anwar dan Mangilep (2018) bahwa Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

### **2.2.7 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Infrastruktur Fisik, PMDN Per Kapita Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Sajafii, 2009). Daerah yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan

sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Dengan perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah yang mapan mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau bertambahnya ketidakmerataan.

Pengaruh Rata-Rata Lama Berpendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel rata-rata lama berpendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (Abdul.G, 2016). Dalam hal ini berkaitan dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga peneliti berasumsi bahwa ketidaksesuaian antara lapangan pekerjaan dengan pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh pencari kerja menyebabkan tingkat hubungan rata-rata lama berpendidikan dengan penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, dkk (2014), yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Karena adanya investasi maka dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagai akibat yang akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut dan akan menambah output nasional sehingga secara tidak langsung mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, infrastruktur jalan, dan sektor sekunder secara tidak langsung berdampak negatif terhadap ketimpangan

pendapatan di Kalimantan Timur. Variabel lain yaitu belanja modal, investasi, sektor primer dan tersier berpengaruh positif. Terhadap dampak ketimpangan pendapatan melalui jalur sektor primer dan penyerapan tenaga kerja, sehingga bagi hasil, belanja modal, dan infrastruktur jalan berdampak positif, sedangkan investasi berdampak negatif. Selanjutnya jika melalui sektor sekunder dan penyerapan tenaga kerja, bagi hasil dan investasi terkena dampak negatif, sedangkan belanja modal dan infrastruktur jalan sama-sama berdampak positif (Anwar, Fattah, Paddu dan Zain, 2016).

#### **2.2.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Infrastruktur Fisik, PMDN Per Kapita Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Harun, dkk (2012) meneliti tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah 2007- 2011. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Investasi memiliki peran aktif dalam menentukan tingkat output, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju investasi (Arsyad, 1999). Sesuai dengan teori, investasi akan memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi naiknya pendapatan yang diterima masyarakat (Sun'an dan Astuti, 2008). Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka pendapatan cenderung membaik, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat investasi berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan.

Sejumlah penelitian menemukan hasil yang bertentangan mengenai hubungan ketimpangan pendapatan infrastruktur. Infrastruktur fisik dalam jangka panjang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan terbalik yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan (Calderon dan Servén, 2004). Sementara itu, infrastruktur fisik ternyata berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di India (Bajar dan Rajeev, 2016 ; Majumder, 2012) dan Indonesia (Makmuri, 2017).

Pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industri maupun upah minimum tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan (Coto , 2006). Hasil penelitian sebelumnya dilakukan pengujian mencakup faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, yang dimana dalam mengukur distribusi pendapatan terkhusus di Sulawesi Selatan maka variabel yang dijadikan variabel yaitu populasi, kontribusi sektor industri dan UMR, sedangkan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan melalui pengujian model regresi. Pemilihan analisis regresi ini karena dalam penelitiannya dilakukan pengujian apakah setiap variabel (populasi, kontribusi output industry, UMR) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun distribusi pendapatannya terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

Integrasi dikombinasikan dengan faktor- faktor lain, seperti pemeliharaan stabilitas makroekonomi, pengembangan sumber daya manusia, rasio

investasi yang tinggi, infrastruktur dan kelembagaan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Ajayi, 2003).

Selama periode waktu 1980-2013, di India, menggunakan analisis Autoregressive Distributed lag (ARDL), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Investasi ditemukan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dengan masing-masing koefisien sebesar -0,282, -0,089, dan -0,003. Serta signifikan empirik ( $\rho$ ) t sebesar -2,539 ( $< 0,01$ ), -3,356 ( $< 0,01$ ), dan -2,006 ( $< 0,01$ ). Pola hubungan yang digunakan untuk membuat keempat variabel tersebut dengan ketimpangan pendapatan adalah logaritma-logaritma, logaritma-logaritma, dan logaritma-logaritma (Pradhan et al., 2016).

### **2.2.9 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Infrastruktur Fisik, PMDN Per Kapita, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan**

Teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa (Mulyadi, 2003). Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif untuk awal mula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru dapat dibutuhkan dalam menjaga agar ekonomi tumbuh, yang dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat *necessary condition* untuk pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kaum klasik percaya akan perekonomian yang dilandaskan dari kekuatan pasar yang selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam keseimbangan semua sumber daya termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full employed*). Dengan demikian didasarkan mekanisme pasar tidak ada pengangguran (terdapat penyerapan tenaga kerja). Jika tidak ada yang bekerja, dari pada memilih tidak mempunyai pendapatan sama sekali,

maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah yang menarik perusahaan memperkerjakan lebih banyak.

Pada pasar persaingan sempurna alokasi sumber yaitu efisien dan tidak adanya penyerapan tenaga kerja (Nurlina, 2009). Pasar monopsoni hanya dapat satu perusahaan dalam pasar tenaga kerja. Pasar monopoli, dimana perusahaan hanya dapat menerima upah yang telah ditetapkan pekerja. Tingkat presentasi distribusi pendapatan, maka terdapat sejumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Sumber daya manusia dan upah mempunyai pengaruh terhadap distribusi pendapatan (P. Estudillo, 1991).

Penyerapan tenaga kerja ialah jumlah tenaga kerja yang diserap untuk usaha tertentu. Dampak penyerapan tenaga kerja ini dapat menjadi negatif karena kenaikan upah minimum yang besar tanpa mempertimbangkan modal dan pengeluaran agregat, (Neumark et al., 2014). Perusahaan kemudian memilih untuk tidak menentukan upah minimum hingga memperkerjakan tenaga kerja dan menegosiasi ulang upah lebih rendah dengan sifat penyerapan tenaga kerja ialah pengganti tenaga kerja lain, pemanfaatan pengangguran, dan tenaga kerja yang bersifat kontrak (Cahuc et al., 2008). Indonesia berupaya dalam melakukan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.

Faktor-faktor yang memberikan dasar teoritis untuk memperkirakan bahwa pengangguran yang tinggi dan terus-menerus mengurangi pertumbuhan tampaknya terkait erat dengan ketidaksetaraan (Castells-Quintana dan Royuela, 2014). Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa pengangguran kemungkinan akan menyebabkan peningkatan ketimpangan. Oleh karena itu, mereka menemukan bahwa dampak negatif dari tingkat pengangguran yang tinggi pada pertumbuhan jangka panjang akan lebih relevan ketika pengangguran yang tinggi dan terus-menerus dikaitkan dengan peningkatan ketimpangan.

Sebuah kajian analisis mengenai hubungan antara pergeseran sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan pola distribusi pendapatan. Dari hasil penelitian Field berhasil memperlihatkan sebuah kajian analisis mengenai bagaimana hubungan antara pergeseran peran sektor ekonomi dengan pola distribusi pendapatan. Dengan demikian dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara penduduk bekerja dengan ketimpangan yang terjadi (Field, 1980 ; Udhar, 2020).

Teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) yang dikembangkan oleh Cafferty (1990) meramalkan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang, dan bagi pekerja sendiri dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya.

Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya pertumbuhan ekonomi, dengan upah yang tinggi maka pekerjapun akan selalu tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan sehingga dengan demikian pekerja akan merasa lebih puas dengan hasil pekerjaannya sedangkan bagi perusahaan merasa tidak mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang trampil dan selalu giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya.

Peningkatan upah minimum diharapkan dapat mampu memperbaiki kesejahteraan para pekerja, mereduksi kesenjangan dengan meningkatkan pendapatan untuk kalangan pekerja rendah (Alaniz, Gindling, & Terrel, 2011). Secara teoritis, hubungan antara upah minimum dengan tenaga kerja dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja maupun pasar output. Pasar

tenaga kerja akan dilakukan dalam tiga bentuk yaitu pasar persaingan sempurna, monopsoni dan monopoli.

Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik yaitu pendapatnya bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (*adjustment*) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian dapat mencapai keseimbangan untuk tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja bahwa dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Apabila tingkat upah diturunkan maka tingkat pendapatan juga akan turun, turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

Untuk melihat kualitas penduduk bekerja dari tingkat pendidikan yang telah bekerja tersebut. Lama waktu tempuh pendidikan untuk seseorang dapat mempengaruhi kualitas penduduk bekerja. Perbedaan kemampuan antara individu satu dengan yang lainnya terjadi akibat dari perbedaan lama waktu sekolah dari setiap individu. Perbedaan kemampuan dan produktivitas individu ini dapat mempengaruhi perbedaan demand tenaga kerja dari keduanya. Pendidikan ialah faktor kunci dalam meningkatkan karir seseorang. Pendidikan mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing seseorang, sehingga dapat meningkatkan bargaining position individu dalam pasar tenaga kerja dan pada akhirnya memungkinkan individu untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Hal ini memperkuat bahwa pendidikan merupakan faktor penentu dari tingkat upah, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memberikan sebuah sinyal positif untuk arus masuk investasi (Kunle et al.,2014). Kegiatan investasi ialah memungkinkan masyarakat secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional hingga meningkatkan pendapatan nasional juga meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Penurunan investasi ini dapat menyebabkan tingkat pendapatan

nasional yang menurun di bawah kapasitas pendapatan nasional. Peningkatan investasi kemudian masuk ke dalam daerah yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi meningkat di suatu daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan (Putri, Amar dan Amon, 2015). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara (Ahmad Fauzi dan Dewa Nyoman, 2016).

### 2.2.10 Studi Empiris

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel		Hasil
		Independen	Dependen	
1.	(Muslimah, H, dan Putri, D, Z, 2021)	Aglomerasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan data panel (cross section dan time series data dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2018). Dan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, SDM berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
2.	(Vo, Nguyen, Tran dan Vo, 2019)	Negara berpenghasilan menengah, sistem GMM	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan data cross section, yaitu adanya dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menyiratkan bahwa peningkatan pendapatan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya diasosiasikan dengan ketimpangan pendapatan, dengan demikian disparitas pendapatan dapat menurunkan output nasional.
3.	(Yumna, Fajar Hidayat, Firman	Konsumsi, Pendidikan	Ketimpangan Pendapatan,	Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan berpengaruh terhadap

	Hidayat, Gultom, dan Suryahadi, 2015)		Pertumbuhan dan Pengangguran	pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Namun, ukuran ketidaksetaraan yang berbeda terkait dengan setiap ukuran hasil secara berbeda. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa ketimpangan konsumsi mempengaruhi pertumbuhan, sementara ketimpangan pendidikan tampaknya lebih penting untuk pengangguran.
4.	(Lin, 2014)	Mobilitas, Volatilitas	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian ini menyoroti konsistensi klaim yang dibuat dalam banyak penelitian sebelumnya, yaitu tingginya tingkat ketimpangan pendapatan akibat dari kurangnya tindakan pemerintah yang berkelanjutan seperti kesempatan yang tidak setara dan volatilitas pendapatan yang tinggi.
5.	(Eric, 2010)	Indeks pendapatan ekonomi, Indeks kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pengurangan kemiskinan pendapatan pada wilayah berkembang yang diteliti. Wilayah yang telah berkembang akibat dari transformasi teknologi dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat miskin yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonominya. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan di Sub-Sahara Afrika. Sedangkan di Amerika Latin, ketimpangan

				pendapatan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa OECD mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun di wilayah SEA, hasilnya tidak menunjukkan signifikan dari hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.
6.	(Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni Sudibia, 2015)	Jumlah penduduk, Investasi	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa pertama jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kedua, jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketiga, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
7.	(Damanik, Zulgani dan Rosmeli, 2018)	Penduduk yang bekerja, investasi, pertumbuhan ekonomi	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa secara simultan penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Secara parsial jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

				ekonomi di Provinsi Jambi, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan.
8.	(Abdulah, 2013)	Upah, pengusaha, urbanisasi, dependensi rasio	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini yaitu koefisien determinasi variabel independen sebesar 6% menunjukkan bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini kurang baik dalam melihat faktor determinan inequality di Jawa Tengah, hanya ada koefisien regresi yang signifikan berpengaruh terhadap inequality (pengusaha dan upah). Sedangkan dua lainnya tidak signifikan (urbanisasi dan dependensi rasio).
9.	(Mahardiki dan Santoso, 2013)	Pertumbuhan ekonomi	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa perhitungan Indeks kesenjangan williamsom diketahui rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar provinsi di Indonesia selama periode 2006-2011 mengalami kecenderungan meningkat. Kenaikan tingkat ketimpangan secara statistic signifikan. Secara umum nilai indeks kesenjangan Theil dari provinsi di Indonesia selama periode 2006-2011 mengalami kecenderungan meningkat di akhir periode meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan ketimpangan pendapatan.
10.	(Khoirudin dan Musta'in, 2020)	Tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi,	Ketimpangan distribusi pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat distribusi pendapatan, upah minimum

		disentralisasi fiskal		berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
11.	(Sungkar, Nazamuddin dan Nasir, 2015)	Upah minimum	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan upah minimum memiliki efek positif pada nilai ketimpangan pendapatan di periode 1999-2013 di Indonesia. Pengaruh upah minimum pada analisis ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa upah minimum menjadi alat yang tidak efisien. Selain itu, kenaikan upah minimum disertai dengan penurunan probabilitas kerja di sektor formal. Efek berpotensi negative ini dapat bekerja dalam mengurangi manfaat keseluruhan yang dapat diperoleh dari kenaikan upah minimum.
12.	(Sutrisno, 2012)	Sektor unggulan	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa ketimpangan pada periode 2007-2010 terjadi adanya kecenderungan adanya peningkatan ketimpangan di Kawasan Barlingmascakeb, baik dengan menggunakan analisis indeks Williamson maupun entropi Theil. Angka rata-rata indeks Williamson di Kawasan Barlingmascakeb sebesar 0,185. Sedangkan angka rata-rata indeks entropi Theil menunjukkan hasil sebesar 0.722. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Barlingmascakeb masih relatif rendah.
13.	(Nangarumba, 2015)	Struktur ekonomi, upah minimum	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk fungsional model semi log pada regresi data panel, dimana

		Provinsi, belanja modal, investasi		<p>ditemukan bahwa PDRB dari sektor pertanian, PDRB sektor jasa, belanja modal, dan kredit investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan pendapatan.</p> <p>Dari sektor pertanian, industri, dan jasa sektor yang paling relevan dalam kaitannya mengurangi besaran tingkat ketimpangan pendapatan, sektor jasa merupakan sektor yang mempunyai pengaruh terbesar dan yang kedua yaitu sektor pertanian. Sektor industri satu-satunya mengaruh positif, artinya jika terjadi peningkatan produktivitas sektor industri akan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan.</p>
14.	(Danawati, Bandesa dan Utama, 2016)	Pengeluaran pemerintah, investasi	Kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.</p>
15.	(Nugroho, 2014)	Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi	Ketimpangan pendapatan	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa analisis trend pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas periode tahun 2002-2011 menunjukkan trend yang naik untuk trend pertumbuhan dan ketimpangan.</p> <p>Berdasarkan perhitungan analisis Indeks Williamson, tingkat ketimpangan di Kabupaten Banyumas periode tahun 2002-2011 termasuk</p>

				<p>ke dalam ketimpangan tinggi dengan rata-rata indkes Williamson 0,55.</p> <p>Berdasarkan analisis Korelasi Pearson, terdapat houngan positif tinggi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas periode 2002-2011.</p> <p>Berdasarkan Uji Granger diketahui bahwa Indeks Williamson mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Banyumas pada periode penelitian.</p>
16.	(Wardhana, Juanda, Siregar dan Wibowo, 2013)	Dana alokasi khusus, Dana alokasi umum	Ketimpangan pendapatan	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa variabel DAU dan DAK Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel DAU dan DAK sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menurunkan ketimpangan pendapatan.</p>
17.	(Hindun, Ady dan Hariyati, 2019)	Pendidikan, pengangguran, kemiskinan	Ketimpangan pendapatan	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan selama tahun 2015-2018, maka disimpulkan bahwa pendidikan dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh.</p>
18.	(Hendarmin, 2019)	Pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, modal manusia	Ketimpangan pendapatan	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan</p>

				variabel modal manusia yang di proksi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Namun jika dilihat secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
19.	(Fithrian, Syechalad dan Nasir, 2015)	Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini bahwa konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Aceh. Sedangkan investasi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir pengeluaran pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan di Aceh.
20.	(Anshari, Azhar dan Ariusni, 2018)	Pendidikan, upah minimum, belanja modal	Ketimpangan pendapatan	Hasil dari penelitian ini yaitu pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan dan belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan seluruh Provinsi di Indonesia.
21.	Krismiyan, N,M,E dan Utama M,S (2019)	Sektor Pariwisata, Sumber Daya Manusia,	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa sektor pariwisata, sumber daya manusia dan kesempatan kerja baik secara langsung dan tidak langsung berpengaruh signifikan dan positif

		Kesempatan Kerja		terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
22.	Abdul, G (2016)	Sumber Daya Manusia, Pengeluaran Pemerintah	Penyerapan Tenaga Kerja	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki hasil signifikan dan negative terhadap penyerapan tenaga kerja dan untuk pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja berpengaruh memiliki hasil signifikan dan positif.
23.	Noviana,S,N (2020)	Upah Minimum, Rasio Infrastruktur	Kesenjangan / Ketimpangan Pendapatan	Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan timeseries yang dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum dan rasio infrastruktur berpengaruh negative dan signifikan terhadap Ketimpangan/ Kesenjangan distribusi pendapatan.
24.	Anshari, M (2018)	Upah Minimum	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang negative signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
25.	Astuti Susilo,K (2018)	Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Upah Minimum, Belanja Modal, Inflasi	Ketimpangan Pendapatan	Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari cross section dan time series dengan pengujian evIEWS fixed effect. Yang dimana hasil penelitiannya yaitu untuk pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan hasilnya positif dan tidak signifikan, untuk IPM terhadap ketimpangan pendapatan positif signifikan, untuk upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan hasilnya negative signifikan, untuk

				belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan positif signifikan dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan hasilnya negative signifikan.
26.	Yoertiara,R,F dan Feriyanto,N (2022)	Jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran terselubung	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja memiliki hasil signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan untuk tingkat pengangguran terselubung memiliki hasil signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan.
27.	Thomas,W,V,Jr (2005)	Minimum Wages	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Minimum Wages and Income Inequality in The American States (1960-2000), menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Amerika.
28.	Sumedha Bajar	Infrastructure	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul The Impact of Infrastructure Provisioning on Inequality
29.	Irma.S, Indah.S dan Nugroho.S.B.M (2018)	Economic Growth, Foreign Direct Investment	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Impact of Economic Growth Per Capita and Foreign Direct Investment on Income Inequality in Indonesia yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dan investasi asing langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara positif.

30.	Astuti (2015)	SDM, IPM, Populasi penduduk, PDRB perkapita	Ketimpangan Pendapatan	<p>Hasil dari penelitian dengan judul Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013 yaitu SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DIY. Tingkat kemakmuran masyarakat PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan, jumlah penduduk dengan variabel populasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p>
31.	Edward L. Glaeser (2006)	skill levels, political,	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan tampaknya juga merupakan hasil dari heterogenitas etnis, yang berdampak pada ketimpangan baik secara langsung, karena etnis yang berbeda memiliki tingkat keterampilan yang berbeda, dan secara tidak langsung melalui jalur politik, karena orang tampaknya kurang bersemangat untuk mentransfer uang kepada orang dari kelompok etnis yang berbeda. Ketimpangan berkorelasi dengan kediktatoran dan dengan pemerintah yang gagal menghormati hak milik. Korelasi ini setidaknya meningkatkan kemungkinan bahwa ketimpangan sebenarnya merupakan variabel kausal yang mengarah pada hasil politik yang lebih buruk, dimana kausalitas mengalir dari</p>

				ketimpangan ke politik. Implikasi penelitian ketimpangan terhadap kebijakan publik masih jauh dari kejelasan.
32.	Rahayu (2000)	Income dioparity, dairy farm	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul 29 Analisis Pemerataan Pendapatan Pada Usaha Ternak Sapi Perah Rakyat (Survey pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Bandung) menunjukkan bahwa membandingkan Gini Rasio di ketiga kecamatan tersebut, tampaknya pemerataan pendapatan di Kecamatan Ciwidey relatif lebih baik dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Namun demikian satu hal perlu dicatat bahwa pemerataan pendapatan yang baik di kecamatan Ciwidey, bukan diperoleh dari unit usahaternak dengan skala ekonomi, tetapi masih pada skala kecil, sehingga pemerataan pendapatan disini tidak mencerminkan adanya gambaran yang jelas terjadinya perbaikan kesejahteraan kehidupan peternak. Dari pembahasan di atas tampak bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antara peternak adalah, penguasaan faktor produksi terutama pemilikan ternak produktif, penguasaan lahan, dan tenaga kerja.
33.	Retnosari (2006)	Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian dengan judul Analisis pengaruh ketimpangan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa barat bahwa Ketimpangan pendapatan di

				daerah-daerah dapat diakibatkan karena pertumbuhan dan terbatasnya yang diperoleh masing-masing daerah yang tidak sama serta pembangunan yang lebih cenderung berpusat di daerah yang telah maju. Hal ini mengakibatkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan salah satu faktor pendorong terjadi ketimpangan distribusi pendapatan daerah yang semakin melebar
34.	Jenkins Stephen P. dan Micklewright John (2007)	Kebijakan public, kemiskinan	Ketimpangan Pendapatan	Hasil dari penelitian dengan judul <i>New Directions in the Analysis of Inequality and Poverty</i> menunjukkan bahwa di dalam pembangunan tidak selamanya kemakmuran dapat terwujud karena dapat juga menimbulkan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ekonomi dapat dipahami sebagai ketidaksetaraan dengan efek ekonomi yang merupakan hasil dari proses ekonomi yang mendasarinya. Ketidaksetaraan dikaitkan dengan perubahan dalam tingkat konteks tren ketidaksetaraan faktual sesuai dengan daerah masing-masing.
35.	Oxfam (2017)	Poverty, economic and gender inequality	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul <i>Reward work, not wealth</i> Ketimpangan dan kemiskinan adalah hasil dari proporsi kecil pertumbuhan pendapatan global yang jatuh ke separuh umat manusia termiskin dalam 25 tahun terakhir. Laporan Ketimpangan Dunia yang dirilis baru-

				<p>baru ini dari World Inequality Lab menunjukkan bahwa 1% teratas menangkap 27% dari total pertumbuhan pendapatan global antara tahun 1980 dan 2016. Sementara itu, 50% terbawah hanya menerima setengah dari itu, atau 12% dari total pertumbuhan pendapatan. 50 Untuk seseorang di 10% terbawah, pendapatan tahunan rata-rata mereka naik kurang dari \$3 dalam seperempat abad. Dan, Ketidaksetaraan ekonomi dan gender saling terkait erat. Sementara di sebagian besar negara, kesenjangan upah gender mendapat lebih banyak perhatian, kesenjangan kekayaan gender biasanya bahkan lebih tinggi. Secara global, lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang memiliki tanah, saham, dan aset modal lainnya;53 laki-laki dibayar lebih tinggi untuk melakukan peran yang sama dengan perempuan, dan laki-laki terkonsentrasi pada pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan status lebih tinggi.</p>
36.	Svizzero dan Tisdell, (2003)	Skill individuals	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan meningkat tidak hanya di antara mereka yang memiliki sifat yang dapat diamati berbeda tetapi juga di dalam kelompok pekerja dengan karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, ras, pendidikan dan pengalaman. Hal ini menimbulkan tantangan bagi teori yang mencoba menjelaskan kenaikan ketimpangan</p>

				pendapatan secara keseluruhan. Misalnya, akses yang lebih besar ke pendidikan telah menimbulkan kebingungan tentang standar yang terkait dengan tingkat pendidikan yang sama. Akibatnya, kemampuan bawaan memainkan peran yang semakin meningkat dalam penentuan imbalan. Demikian pula, pengurangan ukuran sektor publik mungkin telah berkontribusi pada munculnya variabilitas permintaan akan keterampilan. Di antara yang terakhir adalah peran kemampuan bawaan, pergeseran menuju sistem penentuan upah yang terdesentralisasi, dan perubahan permintaan keterampilan. Oleh karena itu, penjelasan tentang ketimpangan di dalam kelompok saling melengkapi dengan penjelasan yang terkait dengan ketimpangan antarkelompok dan dengan demikian membantu menjelaskan peningkatan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.
37.	Fresha Hasiani S., Yusni Maulida, Lapeti Sari (2015)	Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Per kapita	Pertumbuhan ekonomi	Hasil dari penelitian dengan judul Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan yaitu Kondisi kesehatan penduduk membaik berdasarkan angka harapan hidup (usia hidup). Untuk terus memperbaiki kondisi kesehatan penduduknya Pemerintah daerah terus menambah fasilitas kesehatannya. Keadaan pendidikan di Kabupaten Pelalawan

				belum mencapai jenjang sekolah yang diharapkan sehingga masih perlu adanya usaha-usaha yang lebih keras lagi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Dan, pendapatan per kapita penduduk mencerminkan membaiknya kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhannya.
38.	Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani, Rosmeli (2018)	Penduduk bekerja, investasi, pertumbuhan ekonomi	Ketimpangan Pendapatan	Hasil penelitian dengan judul Faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi Secara simultan jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Secara parsial jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Secara parsial jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap

				ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dan pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tidak bisa dihitung nilainya, dikarenakan tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.
39.	Ahmad, D., dan Triani, M. (2018)	Kemiskinan, tingkat pendidikan	Ketimpangan pendapatan	Hasil penelitian dengan judul Analisis Kausalitas antara Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat yaitu bahwa pertama, kemiskinan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat diartikan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan kausalitas. Kedua, kemiskinan mempengaruhi tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat diartikan antara kemiskinan dan tingkat pendidikan hanya memiliki hubungan satu arah. Ketiga, ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi tingkat pendidikan, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sehingga dapat disimpulkan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan satu arah maupun dua arah.

40.	John Jerrim dan Lindsey Macmillan (2015)	GGC, education, investment	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian dengan judul Income Inequality, Intergenerational Mobility, and the Great Gatsby Curve: Is Education the Key yaitu GGC dapat direplikasi menggunakan langkah-langkah alternatif mobilitas antargenerasi dan data yang dapat dibandingkan secara lintas negara. Akan tetapi, kekuatan asosiasi tergantung pada apakah ekonomi transisi disertakan.</p> <p>Di semua negara, pencapaian pendidikanlah yang mendorong hubungan antara pendidikan orang tua dan pendapatan keturunan. Ada hubungan yang kuat antara ketimpangan pendapatan dan efek sisa dan penjelasan dari pendidikan orang tua terhadap penghasilan anak. Dan, Negara-negara dengan ketidaksetaraan tinggi memiliki lebih banyak investasi swasta dalam pendidikan dan lebih sedikit investasi publik. Ini semakin menekankan peran penting sumber daya keuangan dalam transmisi keuntungan di negara-negara dengan ketimpangan yang lebih besar.</p>
41.	Alaniz, Gindling dan Terrel (2011)	Wages and employment, transitions of workers across jobs, transitions	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian dengan judul The impact of minimum wages on wages, work and poverty in Nicaragua yaitu bahwa Hubungan antara kebijakan upah minimum dengan penurunan tingkat kemiskinan bersifat positif. Peningkatan</p>

		into and out of poverty		upah minimum diharapkan dapat mampu memperbaiki kesejahteraan para pekerja, mereduki kesenjangan dengan meningkatkan pendapatan untuk kalangan pekerja rendah
42.	N.Gregory Mankiw (2013)	Minimum wages, employment	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Defending the One Percent yaitu adanya pergeseran permintaan tenaga kerja naik maka keseimbangan upah pun meningkat dan jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa apabila permintaan produksi naik maka harga output akan ikut naik juga, sehingga dapat mempengaruhi penambahan tenaga kerja dan diikuti meningkatnya upah. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat akan memiliki efek terhadap pendapatan masyarakat. Kemudian pada akhirnya meningkatkan daya beli dari masyarakat dan menyebabkan permintaan barang dan jasa menjadi lebih besar, sehingga dapat mendorong produsen dalam memproduksi lebih banyak lagi. Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan ketimpangan akan menurun.
43.	Sumedha Bajar dan Meenakshi Rajeev (2016)	Physical infrastructure, regional inequality	Income Inequality	Hasil dari penelitian ini yaitu secara teori, ada beberapa mekanisme di mana pembangunan infrastruktur menghasilkan dampak yang menguntungkan pada distribusi pendapatan dan

				<p>membantu mengurangi ketimpangan. Namun, bukti untuk ini masih kurang. Dalam kasus India, penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan negatif yang sama antara infrastruktur dan ketimpangan pengeluaran konsumsi untuk variabel infrastruktur. Dampak variabel infrastruktur terhadap ukuran ketimpangan konsumsi menunjukkan bahwa beberapa komponen infrastruktur, terutama listrik dan jalan, cenderung meningkatkan ketimpangan antarpribadi di tingkat daerah. Ini terutama berlaku untuk negara berpenghasilan rendah, karena ukuran ketimpangan yang kurang dipertimbangkan adalah ketimpangan konsumsi dengan peningkatan akses ke jalan raya dan listrik, konsumsi barang-barang seperti mobil kelas atas, perangkat televisi dan lemari es, dan bahan bangunan berkualitas lebih tinggi menjadi lebih mahal. rumah meningkat bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi (dan implikasinya permintaan barang-barang ini) pada awalnya tetapi tidak memiliki akses ke pasar.</p> <p>Namun, untuk negara berpendapatan lebih tinggi, dampak infrastruktur sebagian besar tidak signifikan.</p> <p>Oleh karena itu dapat disimpulkan dari studi bahwa perluasan fasilitas infrastruktur regional dapat meningkatkan tingkat konsumsi rata-rata di antara segmen populasi tetapi dampaknya</p>
--	--	--	--	--

				tidak merata di seluruh populasi, dan disertai dengan peningkatan ketimpangan di negara bagian. Perbaikan dalam pengeluaran untuk layanan sosial membantu mewujudkan konvergensi melalui penurunan ketimpangan antarpribadi. Perluasan infrastruktur dapat mengakibatkan konsumsi yang lebih tinggi dalam bentuk peningkatan pengeluaran per kapita bulanan atau NSDP per kapita yang lebih tinggi.
44.	Amien Makmuri (2017)	Infrastructure	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Infrastructure and inequality : Anempirical evidence from Indonesia dimana hubungan yang berbeda antara lima kategori infrastruktur dan ketimpangan pendapatan yang berbeda. Dampak perbedaan kategori besaran infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan memberikan gambaran bahwa beberapa komponen infrastruktur, yaitu besaran jalan dan telekomunikasi, cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, kuantitas listrik dan bandara berdampak positif pada distribusi pendapatan dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, kualitas infrastruktur yang berdampak pada ketimpangan pendapatan adalah kualitas bandara. Kualitas bandara juga membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun,

				<p>ketika berbagai kategori infrastruktur ini dibentuk sebagai indeks sintetik, hubungan antara indeks-indeks ini dan ketimpangan pendapatan mendukung gagasan bahwa infrastruktur meningkatkan ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian ini menguatkan argumentasi bahwa kuantitas infrastruktur cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, penelitian ini menyisakan banyak ruang untuk perbaikan. Misalnya, untuk menangani masalah endogenitas, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel instrumen yang sesuai dan menggunakan metode estimasi yang lebih maju.</p>
45.	Nyoman Dayuh Rimbawan (2010)	Growth, employment, poverty	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja di Provinsi Bali yaitu Pertumbuhan ekonomi yang kurang mengesankan tersebut berimplikasi pada beberapa indikator kesejahteraan penduduk. Dalam periode yang sama kesempatan kerja memang bertambah, tetapi pertambahan tersebut seiring dengan makin banyaknya pekerja setengah pengangguran dan pekerja tak dibayar. Angka kemiskinan memang mampu ditekan, tetapi di pedesaan angka kemiskinan makin parah dan terjadi variasi yang cukup besar dalam hal pendapatan pekerja yang bekerja</p>

				<p>pada lapangan pekerjaan yang berbeda. Semuanya ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dalam kurun waktu 2005-2009 tidak berkualitas. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi tahun 2009 misalnya, hampir 50 persen merupakan kontribusi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan yang berasal dari investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) menempati proporsi besar ketiga yaitu hanya 9,2 persen setelah ekspor (37,2 persen). Sisanya merupakan kontribusi dari Pengeluaran konsumsi pemerintah dan lembaga swasta serta perubahan inventori. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan jika sebagian besar ditopang oleh kegiatan investasi. Rendahnya peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan relatif terbatas. Kalaupun terjadi penambahan kesempatan kerja sebagian mungkin hanya untuk pekerja yang tak dibayar dan atau bukan pekerja penuh (setengah pengangguran).</p>
46.	Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani (2017)	Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan	Ketimpangan Pendapatan	<p>Hasil dari penelitian dengan judul Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya yaitu diperoleh dari analisis regresi data panel menjelaskan bahwa Random Effect Model (REM) adalah</p>

		Ekonomi, jumlah penduduk		pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan pengaruh variable terikat dengan variable bebas dalam penelitian ini. Berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji t, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan pengaruh yang positif. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) pada signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, nilai IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tahun 2011-2015.
47.	Huang et al. (2015)	Residential carbon	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Income Inequality and Residential Carbon Emissions in the United States: A Preliminary Analysis yaitu bahwa kontribusi sederhana untuk penelitian ekologi manusia struktural tentang penyebab emisi gas rumah kaca antropogenik, dari ketimpangan pendapatan pada berbagai skala menunjukkan hasil analisis hubungan positif antara emisi karbon perumahan tingkat negara bagian dan ketimpangan pendapatan, diukur sebagai indeks Theil, di Amerika Serikat, setelah dikurangi efek dari penyebab emisi manusia

				lainnya. Langkah logis selanjutnya dalam penelitian ini melibatkan evaluasi dampak dari ukuran ketimpangan pendapatan lainnya pada emisi karbon tingkat negara bagian dan tingkat nasional, seperti koefisien Gini yang digunakan secara luas, yang menangkap sifat distribusi pendapatan yang berbeda dari indeks Theil.
48.	Kurniasih (2013)	Transportation, accessibility, IPM, economic growth	Economic inequality	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Aktivitas perekonomian yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian kecenderungan mengalami peningkatan sedangkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga mengalami peningkatan, sehingga memiliki hubungan yang searah atau positif. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pembangunan yang terjadi di Jawa Timur masih belum merata seperti aksesibilitas pendidikan maupun kesehatan serta mobilitas sarana dan prasarana yang kurang baik sehingga hanya bisa dinikmati golongan kaya saja yang memiliki peluang lebih besar dalam aktivitas ekonomi seperti kualitas pendidikan, kesehatan dan modal yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat golongan miskin. Oleh sebab itu ketimpangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin akan semakin tinggi. Kualitas manusia yang digambarkan dengan IPM memiliki hubungan yang

				berlawanan arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan saat terjadinya peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan akan membuat kualitas dari manusia jauh lebih baik terutama pada golongan miskin, sehingga produktivitas masyarakatnya bisa lebih baik dan ketimpangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin jauh lebih rendah. Perbaikan dari mobilitas dan aksesibilitas infrastruktur yang digambarkan dengan kondisi jalan baik, memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan semakin lancarnya mobilitas jalan akan membuat masyarakat golongan miskin lebih mudah dalam mengakses mobilitas barang dan jasa seperti semakin murah biaya transportasi karena mobilitas jalan jauh lebih baik sehingga ketimpangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin bisa lebih rendah.
49.	Chambers (2009)	Capital-Skill Complementarity, Economic Growth	Income Inequality	Hasil penelitian dengan judul Is the Relationship between Inequality and Growth Affected by Physical and Human Capital Accumulation yaitu dengan menggunakan data ketimpangan pendapatan terbaru yang tersedia, bahwa ketimpangan yang lebih tinggi umumnya mengurangi pertumbuhan ekonomi selama periode waktu 5 tahun berikutnya. Penemuan ini

				<p>kuat untuk spesifikasi model dan metodologi estimasi, dan melawan temuan empiris dari model panel berdasarkan Deininger and Squire (1996)</p> <p>kumpulan data panel (mis. Li dan Zou (1998) dan Forbes (2000)). Selain itu, implikasi utama dari pertumbuhan dan ketimpangan yang 'bersatu' Galor dan Moav (2004). Model konsisten dengan bukti empiris yang diberikan di sini. Secara khusus,</p> <p>memegang pencapaian pendidikan di tingkat persentil ke-20 yang lebih rendah. Stok modal fisik per kapita yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan koefisien ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, penalti pertumbuhan terkait dengan peningkatan ketimpangan yang lebih besar dengan persediaan modal. Hal ini sesuai dengan prediksi Galor dan Moav (2004, pg. 1004-5) bahwa "selama kendala kredit sebagian besar mengikat, semakin tinggi pengembalian relatif ke modal manusia semakin banyak merugikan (atau kurang menguntungkan) adalah efek ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara dengan tingkat pencapaian pendidikan sama memiliki koefisien ketimpangan pendapatan menurun dengan stok modal fisik per kapita yang lebih tinggi</p> <p>.</p>
--	--	--	--	--

50.	Dustin Chambers (2010)	Economic Growth, Initial Conditions, Semiparametric	Income Inequality	<p>Hasil penelitian dengan judul Does a rising tide raise all ships, The impact of growth on inequality bahwa ada bukti kuat bahwa distribusi pendapatan negara merespons pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah, terlepas dari perkembangan awal. Namun, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebelumnya mempengaruhi negara maju dan negara berkembang dengan cara yang berbeda secara sistematis. Secara khusus, pertumbuhan jangka panjang sebelumnya mendorong ketimpangan di negara maju, sementara memiliki efek sebaliknya di negara berkembang. Dengan demikian, reaksi negara berkembang terhadap pertumbuhan sesuai dengan studi empiris sebelumnya (lihat Chambers (2007)), sedangkan reaksi negara maju tidak sepenuhnya konsisten dengan temuan sebelumnya.</p>
51.	Nasfi Fkili Wahiba dan Malek El Weriemmi (2014)	Growth, liberalization	Income Inequality	<p>Hasil penelitian ini yaitu melalui pendekatan grafis menunjukkan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan dan keterbukaan terhadap perdagangan, di satu sisi, dan ketimpangan di sisi lain. Ini berarti bahwa hal itu merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan terhadap perdagangan telah menjadi faktor memburuknya keadaan ketimpangan di negara tersebut. Ekonometrika analisis didasarkan pada dua spesifikasi. Pada</p>

				<p>variabel pertama kita telah memilih indeks gini sebagai variabel dependen yang mengukur ketimpangan sedangkan pada variabel dependen kedua adalah laju pertumbuhan ekonomi. Menurut regresi kelompok pertama bahwa pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Membagi periode menjadi dua sub-periode disertai dengan peningkatan nilai koefisien untuk variabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor memiliki semakin menipis. Dua variabel lainnya yaitu perkembangan finansial dan modal manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Hasil yang diperoleh pada regresi kelompok kedua, dimana variabel dependennya adalah laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa openness to trade, financial development dan human capital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengenai ketimpangan, tanda negatif koefisien Gini mencerminkan pengaruh negatif variabel ini pada pertumbuhan ekonomi. Pembagian periode menjadi dua sub periode disertai dengan perubahan tanda koefisien pada sub periode pertama menjadi negatif pada sub periode kedua seiring dengan percepatan proses liberalisasi ekonomi komersial. Hasil ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa negara tersebut telah mencapai</p>
--	--	--	--	--

				tingkat ketimpangan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
52.	Ayla Ogus Binatli (2012)	Growth	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian dengan judul Growth and Income Inequality: A Comparative Analysis yaitu Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan adalah masih ambigu. Dalam pekerjaan empiris, sebagian besar karena tidak dapat diandalkan data dan hubungan kompleks antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan. Analisis ini menunjukkan bahwa pengaruh negatif ketimpangan pendapatan pada pertumbuhan mungkin karena efek mendominasi data sebelumnya sampai tahun 1985. Perbandingan dua periode waktu juga menunjukkan hubungan yang berubah antara volatilitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Volatilitas output biasanya memiliki banyak efek yang lebih besar pada ketimpangan pendapatan daripada sejak tahun 1985.</p> <p>Analisis empiris menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan distribusi pertumbuhan ekonomi pada tahun sembilan puluhan mungkin positif yang mendukung hipotesis ketimpangan pendapatan dapat memfasilitasi pertumbuhan yang lebih cepat dalam jangka pendek. Klasik dan ekonom neoklasik berpendapat bahwa lebih</p>

				<p>egaliter distribusi pendapatan akan menyebabkan tabungan yang lebih rendah, yang akan menghambat investasi dan dengan demikian menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat. Sebaliknya, teori pertumbuhan endogen mempertahankan bahwa ketimpangan pendapatan buruk untuk pertumbuhan seperti yang menyebabkan kerusuhan sosial yang dapat menciptakan ketidakstabilan politik. Dalam literatur, efek negatif yang konsisten dari ketimpangan pada pertumbuhan didokumentasikan meskipun signifikansi efeknya terbuka berdebat. Makalah ini berpendapat bahwa efek ini mungkin disebabkan oleh mendominasi efek data dari sebelum tahun sembilan puluhan.</p> <p>Pengaruh pertumbuhan terhadap ketimpangan pendapatan dari waktu ke waktu adalah juga diselidiki. Di kedua periode, pendaftaran di sekolah dasar tingkat pendidikan dan fertilitas merupakan faktor penentu yang signifikan dari ketimpangan pendapatan. Volatilitas pertumbuhan meningkatkan pendapatan ketimpangan dan besarnya efek menurun lebih waktu. Dalam jangka waktu terakhir, peningkatan 1 persen dalam volatilitas pertumbuhan meningkatkan koefisien Gini sebesar 0,3</p>
--	--	--	--	--

				sedangkan pada kenaikan 1 persen sebelumnya akan menghasilkan a Koefisien gini yang lebih tinggi sebesar 1,3 poin.
53.	Mark W. Frank (2009)	Economic growth, Human capital	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Income Inequality, Human Capital, and Income Growth yaitu bahwa pendapatan tertinggi berbagi penyebab Granger pertumbuhan pendapatan, tetapi hanya bukti lemah bahwa pertumbuhan pendapatan Granger-menyebabkan puncak desil. Temuan kami juga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan tingkat negara bagian tampaknya meresponsnegatif terhadap perubahan permanen pada bagian pendapatan desil teratas. Selain itu, hubungan antara desil teratas dan pertumbuhan pendapatan tampaknya terkait dengan kepadatan populasi negara bagian, dengan negara bagian Timur yang lebih padat penduduknya menunjukkan asosiasi terkuat.
54.	Sharafat Ali (2014)	Development, Manufacturing Value Added, Investment	Income Inequality	Hasil dari penelitian dengan judul Inflation, Income Inequality and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration Analysis yaitu Analisis ini mencoba untuk mengeksplorasi dampak inflasi dan ketimpangan pendapatan pada pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Pakistan. Dampak investasi asing langsung, pekerja pengiriman uang dan nilai sektor manufaktur ditambahkan pada pertumbuhan juga dianalisis

				<p>dengan menggunakan data deret waktu tahunan. kointegrasi Johansen pendekatan digunakan untuk memeriksa beban dari variabel pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran menyimpulkan hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Selain itu, ada pertumbuhan merangsang dampak inflasi, FDI, pengiriman uang, dan nilai tambah manufaktur Pakistan. Hasil investigasi menunjukkan hal itu ketimpangan pendapatan lebih baik untuk pertumbuhan tetapi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi sangat membantu untuk menetes</p> <p>menurunkan manfaat pertumbuhan bagi masyarakat miskin di ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah harus difokuskan pada redistribusi pendapatan melalui pajak progresif. Lebih-lebih lagi, ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi penyebab ketimpangan pendapatan di Pakistan. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan ekonomi untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan memastikan hasil dari pengeluaran pemerintah untuk berkontribusi pertumbuhan inklusif. Inflasi disimpulkan memiliki dampak perangsang pertumbuhan ekonomi. Tetapi tingkat inflasi yang lebih tinggi</p>
--	--	--	--	--

				berdampak buruk pada pengentasan kemiskinan dampak pertumbuhan. I
55.	César Calderón and Luis Servén (2004)	Infrastructure, Growth	Income Inequality	<p>Hasil dari penelitian dengan judul The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution yaitu bahwa dampak dari pembangunan infrastruktur yang diukur dengan stok aset infrastruktur yang lebih besar dan peningkatan kualitas layanan pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, yang dinilai dari estimasi pertumbuhan dan pendapatan yang ditambah dengan infrastruktur regresi ketimpangan menggunakan data untuk sampel 121 negara selama periode 1960-2000, dan menggunakan berbagai teknik variabel instrumental untuk mengontrol potensi endogenitas faktor penentu pertumbuhan dan ketimpangan infrastruktur dan non-infrastruktur. Dimana saham infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perubahan dalam ukuran infrastruktur yang digunakan serta estimasi teknik yang diterapkan. Sebaliknya, hubungan antara kualitas infrastruktur dan pertumbuhan terlihat secara empiris kurang kuat, meskipun ini mungkin mencerminkan keterbatasan ukuran kualitas kami atau juga fakta bahwa kuantitas dan kualitas berkorelasi kuat, sehingga kualitas berpengaruh pada pertumbuhan sudah</p>

				<p>ditangkap oleh ukuran kuantitas. Kedua, kuantitas dan kualitas infrastruktur memiliki dampak negatif yang kuat terhadap pendapatan ketidaksamaan. Terlepas dari teknik ekonometrika dan ukuran ketimpangan yang digunakan koefisien gini bahwa ketimpangan menurun tidak hanya dengan semakin besarnya saham infrastruktur tetapi juga dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur. Hasil di atas mencerminkan kausal, dan bukan hanya kebetulan, dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan dan ketimpangan.</p>
56.	Castells- Quintana dan Royuela (2014)	Agglomeration, Urbanization, Economic Growth	Income Inequality	<p>Hasil penelitian ini bahwa efek ketimpangan pendapatan dan aglomerasi di tingkat negara pertumbuhan ekonomi, hasil empiris menunjukkan sejalan dengan literatur bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi membatasi pertumbuhan dalam jangka panjang. Namun, juga sejalan dengan literatur, konsentrasi perkotaan cenderung mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi aglomerasi yang dialami negara-negara ketika aktivitas ekonomi terkonsentrasi di tingkat perkotaan. Meningkatnya ketimpangan dan meningkatnya urbanisasi meningkatkan pertumbuhan pada tahap awal pembangunan,</p>

				<p>ketika negara miskin dan distribusi pendapatan relatif sama, apa yang kita memahami mencerminkan proses konsentrasi sumber daya yang terkait dengan ekonomi perkembangan. Namun demikian, ketika ketimpangan menjadi terlalu tinggi, keuntungannya hilang dan peningkatan konsentrasi bahkan dapat merosot.</p>
57.	Nely Ayu Adriani Udhar (2020)	Transformasi struktural, penyerapan tenaga kerja, pendapatan perkapita	Ketimpangan Pendapatan	<p>Hasil penelitian dengan judul Pengaruh Dinamika Sektor Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan dimana melakukan sebuah kajian analisis mengenai hubungan antara pergeseran sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan pola distribusi pendapatan. Dari hasil penelitian Field berhasil memperlihatkan sebuah kajian analisis mengenai bagaimana hubungan antara pergeseran peran sektor ekonomi dengan pola distribusi pendapatan. Dengan demikian dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara</p>

				penduduk bekerja dengan ketimpangan yang terjadi.
58.	Yosi Eka Putri, Syamsul Amar, Hasdi Aimon (2015)	Fiscal autonomy, tax ratio, labor productivity, investment, human development (IPM)	Income inequality, economic growth	Hasil dari penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia yaitu Variabel derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengankata lain, apabila derajat otonomi fiskal daerah dan investasi mengalami peningkatan sedangkan rasio pajak turun maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas

				tenagakerja, investasi dan IPM akan menyebabkan peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
59.	Anwar, Fattah, Paddu dan Zain (2016)	Struktur ekonomi, penyerapan tenaga kerja	Ketimpangan pendapatan	Dana bagi hasil sumber daya, infrastruktur jalan, dan sektor sekunder secara tidak langsung berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur. Variabel lain yaitu belanja modal, investasi, sektor primer dan tersier berpengaruh positif. Terhadap dampak ketimpangan pendapatan melalui jalur sektor primer dan penyerapan tenaga kerja, sehingga bagi hasil, belanja modal, dan infrastruktur jalan berdampak positif, sedangkan investasi berdampak negatif. Selanjutnya jika melalui sektor sekunder dan penyerapan tenaga kerja, bagi hasil dan investasi terkena dampak negatif, sedangkan belanja modal dan infrastruktur jalan sama-sama berdampak positif. Akhirnya pengaruh tidak langsung melalui sektor tersier

				dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa bagi hasil, belanja modal.
60.	Ayas T. Wiguna dan Maddaremmeng A. Panennungi. (2017)	Keterbukaan ekonomi	Ketimpangan pendapatan	Keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia. Sebaliknya interaksi antara keterbukaan perdagangan dengan share of labor sektor manufaktur menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan tidak secara langsung memengaruhi keterbukaan perdagangan, tetapi pengaruhnya dapat terlihat melalui perpindahan tenaga kerja yang mengikuti migrasi industri dan adanya perbedaan produktivitas antara sektor manufaktur dengan sektor lain yang berdampak signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan antardaerah. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa provinsi yang memiliki

				<p>sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian yang tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di dalam provinsi, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di dalam provinsi di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---